



LAKIP



**Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2021**





KATA PENGANTAR



Peraturan Menteri Negara

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Dharmasraya yaitu:

” **MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA**“, sesuai yang telah ditetapkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya jangka waktu 5 tahun periode 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya telah berhasil dalam melaksanakan kinerja, dengan adanya laporan ini diharapkan jadi bahan evaluasi agar kedepannya lebih terukur antara Aspek Perencanaan, Pengorganisasian, Pengawasan, Pelaksanaan, dan Evaluasi untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat Dharmasraya.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari partisipasi, kerjasama serta kerja keras semua pihak yakni masyarakat, dunia swasta dan aparat pemerintah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhirnya atas kontribusi tersebut kepada semua pihak kami ucapkan terimakasih.



PulauPunjung, Februari2022

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Daerah untuk mendorong tatakelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerja-

nya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi. Pemerintah untuk terus

meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) harus memuat visi, misi Kepala Daerah, termasuk tujuan dan sasaran serta tolok ukur /Indikator kinerja Utama yang jelas dapat diukur, diuji dan diandalkan atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai guna perwujudan Visi **MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA** bermakna Hadimya di Kabupaten Dharmasraya pada priode 2016-2021 yang memuat misi tugas :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan,perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun.

Misi-misi tersebut diatas dalam LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang. Melalui langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas sebagai perangkat negara dalam pelaksanaa dan



Revolusi mental Bangsa. Kemudian dari pada itu yang pasti masyarakat mendapatkan hasil dari Kinerja Instansi Pemerintah itu sendiri.



DAFTAR

Surat Pernyataan telah di Reviu oleh APIP	
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Bab I PENDAHULUAN	
A. Dharmasraya Sekilas	1
B. Gambaran Penduduk Dharmasraya	2
C. Riwayat Kabupaten Dharmasraya	6
D. Permasalahan di Kabupaten Dharmasraya	8
E. Estematika Penulisan	8
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
A Visi Dan Misi	9
B Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	10
C Perjanjian Kinerja Tahun 2021	12
Bab III KINERJA Daerah	
A Pengukuran Kinerja	14
B Realisasi Anggaran	60
Bab IV PENUTUP	68
Lampiran :	
Perjanjian Kinerja Tahun 2021	



DAFTAR

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Bupati Dharmasraya Tahun 2021	12
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Tahun 2021	13
Tabel 3. 1	Capaian Kinerja Berdasarkan Target Kinerja Tahun 2021	15
Tabel 3. 2	Perbandingan Capaian Kinerja Dalam Tiga Tahun Terakhir (Tahun 2019-2021)	16
Tabel 3. 3	Capaian Kinerja Berdasarkan Target Rpjmd Tahun 2021	17
Tabel 3. 4	Perbandingan Capaian Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	18
Tabel 3. 5	Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Alternatif Solusi Tahun 2021	20
Tabel 3. 6	Efisiensi Keuangan Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021	25
Tabel 3. 7	Efektifitas Kegiatan Tahun 2021	26
Tabel 3. 8	Efisiensi Sumber Daya Aparatur	27
Tabel 3. 9	Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021	60

BAB I

PENDAHULUAN



A. Dharmasraya Sekilas

Dharmasraya adalah nama sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Letak geografis Kabupaten Dharmasraya 00048'25,4"- 1041'40,3" LS dan 10108'32,5"-101053'30,2" BT.. Luas wilayah berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 adalah 2.961,13 Km² (296.113 Ha). Sebesar 87,4% dari luas wilayahnya merupakan lahan pertanian, sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 pada RTRW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 3.025,99 km² (302.599) Ha.

Dengan posisi sangat strategis berada di segitiga emas Sumbar, Riau dan Jambi, persisnya di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Batas sebelah selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Batas sebelah timur dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan batas sebelah barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 wilayah administrasi Kecamatan dan 52 Nagari atau pemerintahan setingkat Desa. Selain itu untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten (Pemerintah Kabupaten) Dharmasraya menerbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Perda tersebut Pemerintah Kabupaten membentuk 18 dinas daerah, 3 (tiga) badan dan 1 (Satu) kantor. Dengan komposisi tersebut diharapkan pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemerintahan dapat dilakukan dengan baik.

Dilingkungan legislatif, ada 30 anggota DPRD yang berasal dari 10 partai politik. Sebagian dari anggota legislatif telah duduk sebagai anggota DPRD dalam beberapa periode. Dan juga sebagian besar anggota DPRD adalah berpendidikan sarjana. Dengan demikian, kualitas legislatif dianggap cukup mumpuni untuk bekerjasama dengan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan cita cita pembangunan.

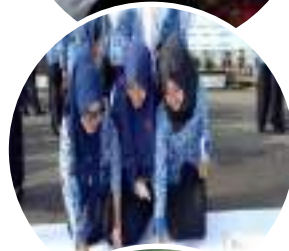


Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya, Untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memiliki 3.493 Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka bertugas di berbagai organisasi perangkat daerah, baik sebagai pejabat struktural, pejabat fungsional maupun pelaksana. Dilihat dari golongannya, sebagian besar ASN yang ada merupakan pegawai golongan III dengan pendidikan sarjana. Ini berarti, secara umum ASN di Kabupaten Dharmasraya memiliki kemampuan cukup untuk mengemban tugas di lingkungan masing masing

Dari segi Pendidikan, sebanyak 2485 orang atau 71,14% dari seluruh ASN di lingkungan Kabupaten Dharmasraya merupakan lulusan pendidikan strata I, 561 orang dengan jenjang pendidikan diploma, dan hanya 0,68 % yang berasal dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Pertama



ASN Golongan I&II : 467 Orang



ASN Golongan III : 2.347 Orang



ASN Golongan IV : 679 Orang

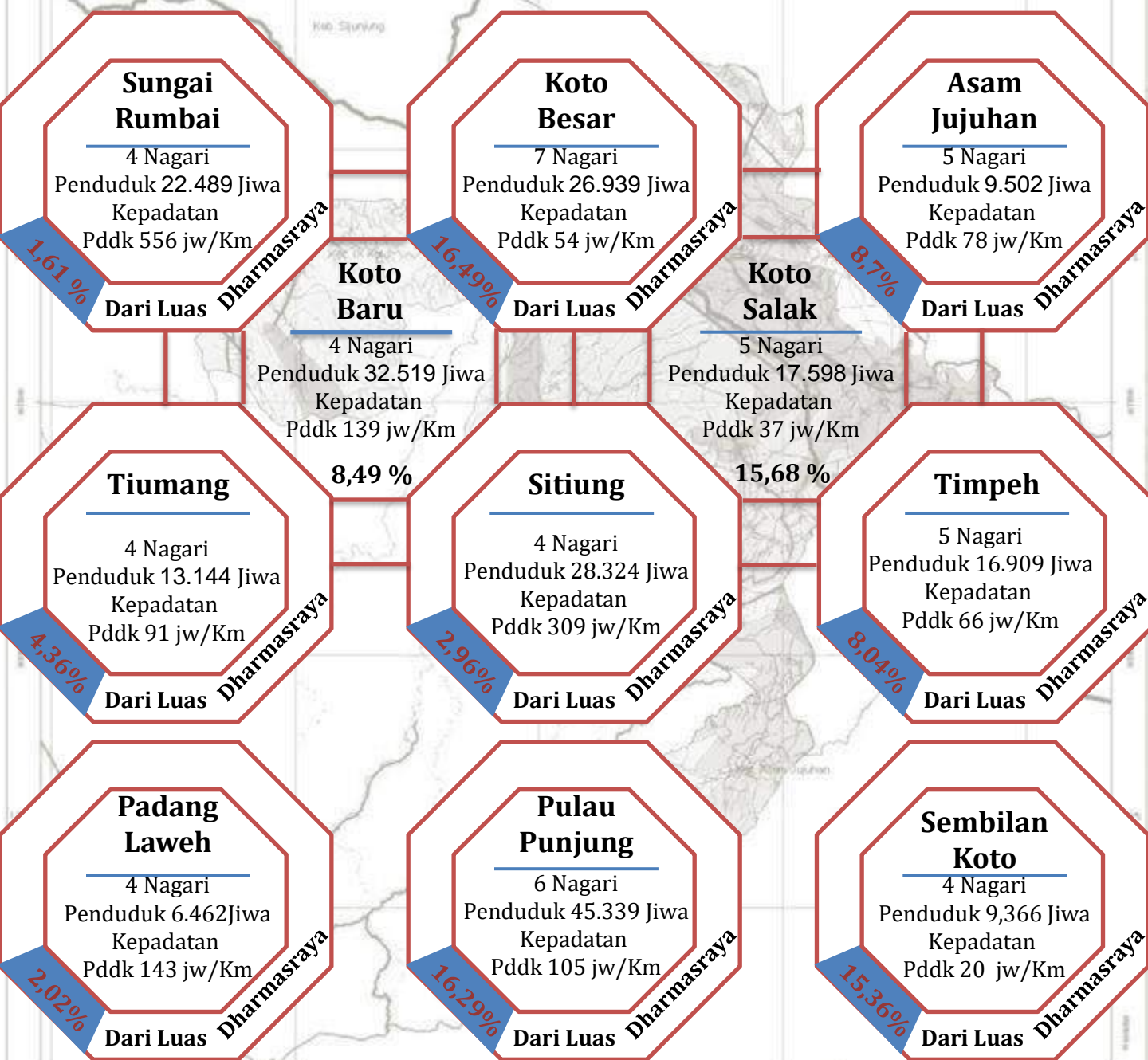
Sumber: BKPSDM Dharmasraya, 2021

B. Gambaran Penduduk Dharmasraya

Sebagian besar wilayah Kabupaten Dharmasraya telah dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian, mulai tanaman pangan, perkebunan dan perikanan yang mencapai 87,74 persen dari total luas wilayah.

Pemanfaatan lahan untuk pengembangan usaha ini telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian. Dengan memanfaatkan lahan, khususnya untuk pengembangan sektor pertanian secara luas, maka kebutuhan pangan dan papan masyarakat telah terpenuhi. Selain itu, usaha pertanian yang dilakukan juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di daerah ini. Dengan membaiknya pendapatan, maka masyarakat dapat mengakses pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya dengan lebih baik. Ini terlihat dari nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Dharmasraya Tahun sebesar 71,76.

KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN



Sumber: BPS Dharmasraya;2021

Berdasarkan data Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya ,Kabupaten Dharmasraya dihuni oleh 228.591 jiwa penduduk, terdiri dari penduduk laki-laki 116,310 jiwa dan penduduk perempuan 112,281 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dengan sex ratio 107,74. sementara jumlah penduduk terbanyak adalah pada usia produktif yaitu usia 25-29 tahun dan juga usia Balita. Sedangkan untuk kepadatan penduduk, Kecamatan Sungai Rumbai dimana setiap kilometer wilayahnya dihuni oleh 556 jiwa. Dengan komposisi demikian, jumlah angkatan kerja dan jumlah kebutuhan lapangan kerja menjadi permasalahan utama dalam sosial ekonomi masyarakat.

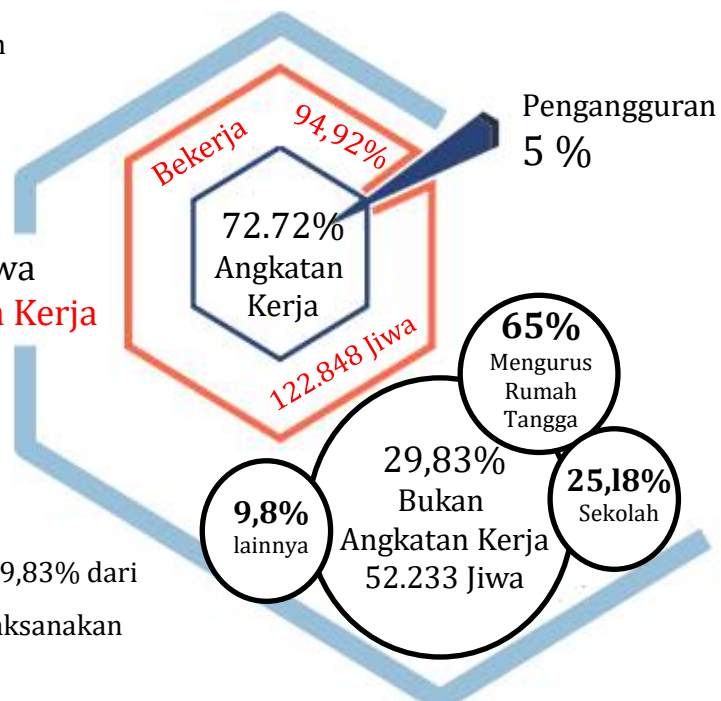
Kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, air minum, protein dan energi juga terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya, angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah serta usia harapan hidup terus meningkat.

Mata pencaharian penduduk Kabupaten

Dharmasraya sebagian besar adalah bertani, kemudian disusul sektor jasa (perdagangan, perhotelan, restoran), industri pengolahan, jasa servis dan lain lain.

Dari jumlah penduduk, 72,72 persen di antaranya merupakan angkatan kerja produktif. Dari jumlah angkatan kerja produktif, hanya 5,08 persen yang tidak bekerja alias menganggur. Sedangkan bukan angkatan kerja hanya 29,83% dari Total penduduk usia bekerja, dan sebagian besar melaksanakan Mengurus rumah tangga

156.382 Jiwa
Penduduk Usia Kerja



Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dan BPS Dharmasraya Tahun 2021

Perekonomian Daerah

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dharmasraya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Ini sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian masih menjadi kontributor terbesar dalam PDRB, disusul sektor jasa dan sektor perdagangan.

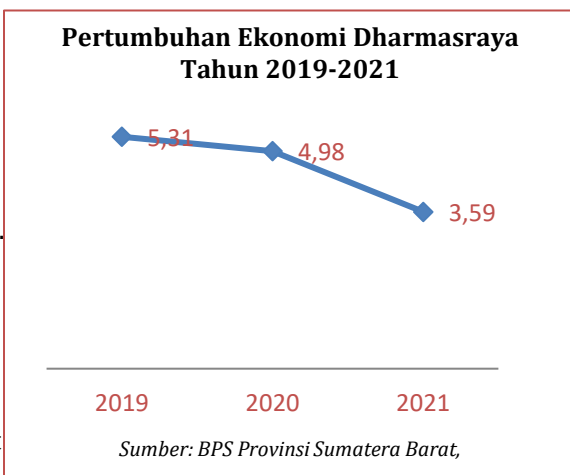
Namun, jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Berdasarkan PDRB per Kapita, Laju ekonomi di Kabupaten Dharmasraya mengalami Penurunan dalam kurun 3 tahun terakhir. Hal ini perlu menjadi perhatian Lebih bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan laju pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dharmasraya.

Jika kesejahteraan masyarakat salah satunya dilihat Dari angka kemiskinan. Angka kemiskinan juga mengalami penurunan.

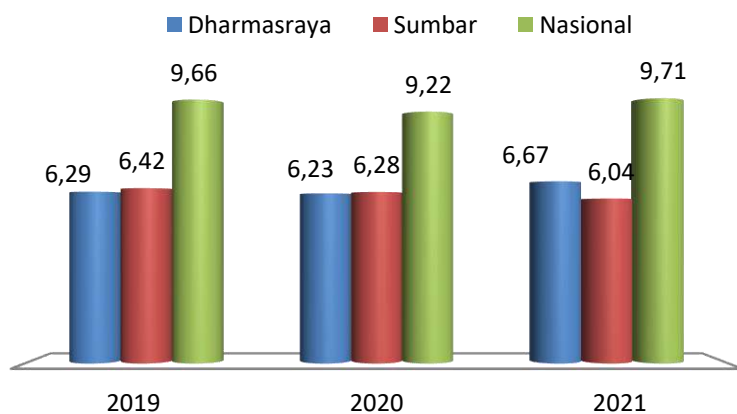
Dibanding rata rata tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat,

angka kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya lebih rendah. Ini menunjukkan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap sumberdaya alam sudah semakin baik serta situasi dan kondisi untuk mengembangkan usaha juga semakin kondusif.

Bahkan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Nasional, angka kemiskinan Kabupaten Dharmasraya Sudah jauh dibawah angka kemiskinan Nasional



Angka Kemiskinan Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional;2021

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu dari 3 kabupaten baru hasil pemekaran di Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003. Kabupaten ini lahir dari pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang terdiri dari 4 kecamatan dengan luas 2.961, 13 Km atau 296.113 Ha. Secara geografis kabupaten Dharmasraya berada pada posisi, 00 47'7" LS -- 141' 56", Lintang Selatan (LS) dan, 1019' 21", BT -- 1010 54' 27", Bujur Timur (BT).



Kabupaten Dharmasraya secara sosial budaya terdapat sejumlah etnis, seperti Jawa, Sunda, Batak, dan tentu saja Minangkabau yang paling dominan. Dengan multi etnis tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berupaya membangun identitas ke-Dharmasraya-an yang berakar dari etnis yang ada. Akulturasi dan amalgamasi dibangun secara alamiah dengan membaurkan etnis-etnis yang ada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan dan juga dengan mendorong pelaksanaan berbagai event budaya, sehingga trend kebudayaan baru hasil akulturasi dan amalgamasi ini akan menjadi identitas baru yakni Dharmasraya.



Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk membangun identitas kabupaten adalah dengan pelaksanaan Festival Pamalayu. Kegiatan tersebut mengangkat sebuah peristiwa ekspedisi pada abad ke-XIII masehi, dimana Raja Kertanegara dari Singasari mengutus delegasi ke Kerajaan Swarnabhumi dengan mengirimkan sebuah arca perdamaian yang dikenal dengan arca Amoghapasa. Ekspedisi ini dikenal sebagai sebuah ekspedisi damai dan kelak hasilnya menjadi bagian dari upaya menyatukan nusantara.



Dalam prasasti yang dipahatkan di alas arca Amoghapasa, terungkap bahwa di Kabupaten Dharmasraya pernah ada sebuah pusat kerajaan bernama kerajaan Swarnabhumi, yang merupakan kerajaan melayu kuno. Saat ini banyak peninggalan sejarah masa silam yang patut untuk digali dan diterjemahkan, nilai luhur apa yang terkandung di dalamnya. Inilah yang akan menjadi identitas Dharmasraya, sebagai salah satu daerah yang pernah memiliki peran besar dalam membangun nusantara di masa lalu.

C. Riwayat Kabupaten Dharmasraya



Sebelum dimekarkan, Kabupaten Dharmasraya merupakan bahagian dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Pada saat itu ada 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Sungai Rumbai. Program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah pusat pada tahun 1977, berhasil dengan baik. Keberhasilan program transmigrasi tersebut membawa dampak terhadap pembauran antara masyarakat transmigran dengan masyarakat setempat, peningkatan perekonomian masyarakat dan mendorong perkembangan wilayah.

Perkembangan wilayah dan juga masyarakat menjadikan adanya tuntutan pelayanan yang memadai. Tuntutan ini kemudian dijawab dengan dimekarkannya Kabupaten Sawahlunto Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003, maka Pemerintah resmi membentuk Kabupaten Dharmasraya,. Pada tanggal 7 Januari 2004, Presiden Megawati Soekarno Putri meresmikan kabupaten Pemekaran di Istana Negara, termasuk Kabupaten Dharmasraya

Aktifitas pemerintahan Kabupaten Dharmasraya secara riil baru dilakukan setelah dilantiknya Pejabat Bupati pertama pada tanggal 10 Januari 2004. Saat itu, penjabat Bupati pertama Drs, H. Ahmad Munawar, MM memulai pemerintahan dengan merekrut sejumlah personil dan juga menyiapkan perkantoran, terutama kantor bupati. Untuk pertama kali personil direkrut dari kabupaten induk yang bersedia pindah ke Dharmasraya dan para pegawai yang bertugas di kabupaten baru.

Berdasarkan panduan dari Kementerian Dalam Negeri, Penjabat Bupati Ahmad Munawar memberlakukan SOTK khusus kabupaten pemekaran dengan mengisi SOTK dengan personil yang ada. Mandat yang diberikan oleh penjabat bupati, selain menyiapkan struktur organisasi pemerintahan, juga membentuk DPRD dan menyiapkan pemilihan kepala daerah. Pembentukan DPRD dilakukan dengan melaksanakan konversi suara dari daerah pemilihan (Dapil) wilayah Kabupaten sesuai dengan tatacara konversi suara menjadi kursi dan jumlah anggota DPRD. Pada saat itu, jumlah anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya 25 orang.

Penjabat Bupati H. Ahmad Munawar tidak bisa melanjutkan tugasnya. Yang bersangkutan wafat tiga bulan setelah dilantik dan digantikan oleh Drs. Asrul Syukur yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung. Asrul merupakan pamong senior yang telah malang melintang bertugas di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, termasuk yang kemudian menjadi Kabupaten Dharmasraya.



Bupati I Kabupaten Dharmasraya
Bpk. H. Marlon Martua Situmeang, S.E



Bupati 2 Kabupaten Dharmasraya
Bpk. Ir. H. Adi Gunawan, M.M



Bupati 3 Kabupaten Dharmasraya
Bpk. Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E

Di tangan Asrul Syukur pemilihan bupati disiapkan. Namun kemudian dieksekusi oleh Drs. Bakri. Asrul Syukur sendiri kemudian ikut berkompetisi dalam pemilihan bupati Dharmasraya, sehingga harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Penjabat Bupati Dharmasraya dan digantikan oleh Drs. Bakri yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya. Bakri dengan gemilang mengantarkan Kabupaten Dharmasraya memilih bupati definitif pertama.

Pada tahun 2005, terpilih Bupati Dharmasraya devinitif pertama periode 2005-2010, yaitu H. Marlon Martua, SE sebagai Bupati dan Ir. Tuginin sebagai Wakil Bupati. Pasangan itu membawa visi “Mewujudkan Kabupaten Dharmasraya yang Maju Dalam Keseimbangan”.

Kemudian pada periode 2010-2015 bupati dan wakil bupati Dharmasraya dijabat oleh Ir. H. Adi Gunawan, MM dan Drs. H. Syafruddin. R. pasangan itu membawa visi “Terwujudnya masyarakat Dharmasraya yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya, adil dan sejahtera pada tahun 2015”.

Selanjutnya Kabupaten Dharmasraya dipimpin oleh Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE selama 2 (dua) periode. Periode pertama Tahun 2016-2021, Bupati Sutan Riska didampingi oleh Wakil Bupati Amrizal Dt Rajo Medan, pada periode kedua, didampingi oleh Wakil Bupati H. Dasril Panin Datuk Labuan. Kedua pemimpin ini membawa visi “Menuju Kabupaten Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya”

Selain itu, pencapaian yang tidak kalah membanggakan dari seorang Sutan Riska Tuanku Kerajaan adalah, terpilihnya beliau sebagai ketua umum APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, periode 2021-2026

Dalam usia kabupaten yang sudah mencapai 18 tahun, Kabupaten Dharmasraya lepas dari daerah sangat tertinggal, bahkan telah dinobatkan menjadi salah satu Kabupaten Maju Versi Indeks Desa Membangun, perekonomiannya terus meningkat, pemerintahannya semakin mantap dan juga telah meraih prestasi di berbagai even, baik regional maupun nasional.



D. PERMASALAHAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dharmasraya masih di bawah angka Provinsi dan Nasional
2. PDRB perkapita masih di bawah angka nasional
3. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih dibawah Provinsi dan Nasional
4. Jalan dalam Kondisi mantap belum memadai
5. Belum seluruh masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak
6. Masih adanya masyarakat yang menetap dirumah tidak layak huni
7. Masih adanya pemukiman kumuh
8. Tingginya tingkat pencemaran air di Kabupaten Dharmasraya terutama sepanjang aliran sungai batang hari
9. Penurunan kualitas (degradasi) lahan sehingga meningkatnya lahan kritis
10. Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Dharmasraya masih di atas angka Provinsi Sumatera Barat
11. Banyaknya koperasi tidak aktif yang merupakan koperasi dari saat Kabupaten Dharmasraya belum dimekarkan
12. Angka Kemiskinan Kabupaten Dharmasraya masih diatas angka Provinsi

E.SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I – PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2021

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

menjelaskan capaian kinerja organisasi, perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah serta realisasi anggaran tahun yang bersangkutan.

BAB IV – PENUTUP

menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021, maka tahun 2021 ini merupakan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah di tahun terakhir. Ini berarti, kondisi lingkungan strategis yang digunakan dalam perencanaan kinerja adalah gambaran dari separoh perjalanan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya.

Adapun visi yang ingin dicapai dalam lima tahun periode RPJMD adalah **“Menuju Dharmasraya yang Mandiri dan Berbudaya”**. Dalam visi tersebut ada dua kata kunci, yaitu Mandiri dan Berbudaya. Mandiri dapat digambarkan bahwa ekonomi daerah yang memiliki daya tahan menghadapi fluktuasi ekonomi eksternal, dengan mendorong keragaman produksi daerah, ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi keluarga serta meningkatkan nilai tambah produk komoditi daerah.

Selain itu mandiri juga dapat digambarkan sebagai makin besarnya peranan masyarakat dalam pengelolaan hasil pertanian, jaringan distribusi dan pemasaran. Dan juga berkurangnya arus modal dan pelayanan penduduk keluar daerah, karena semakin tersedianya berbagai sarana ekonomi dan sosial di daerah sendiri bagi kebutuhan masyarakat dan lebih lanjut diharapkan mampu melayani daerah sekitarnya.

Berbudaya dapat digambarkan semakin cerdas, terdidik dan terampilnya anak negeri dan kuatnya identitas budaya Dharmasraya yang multikultural, yang berkarya, berinovasi dan mencipta untuk kesejahteraan berdasarkan iman dan taqwa.

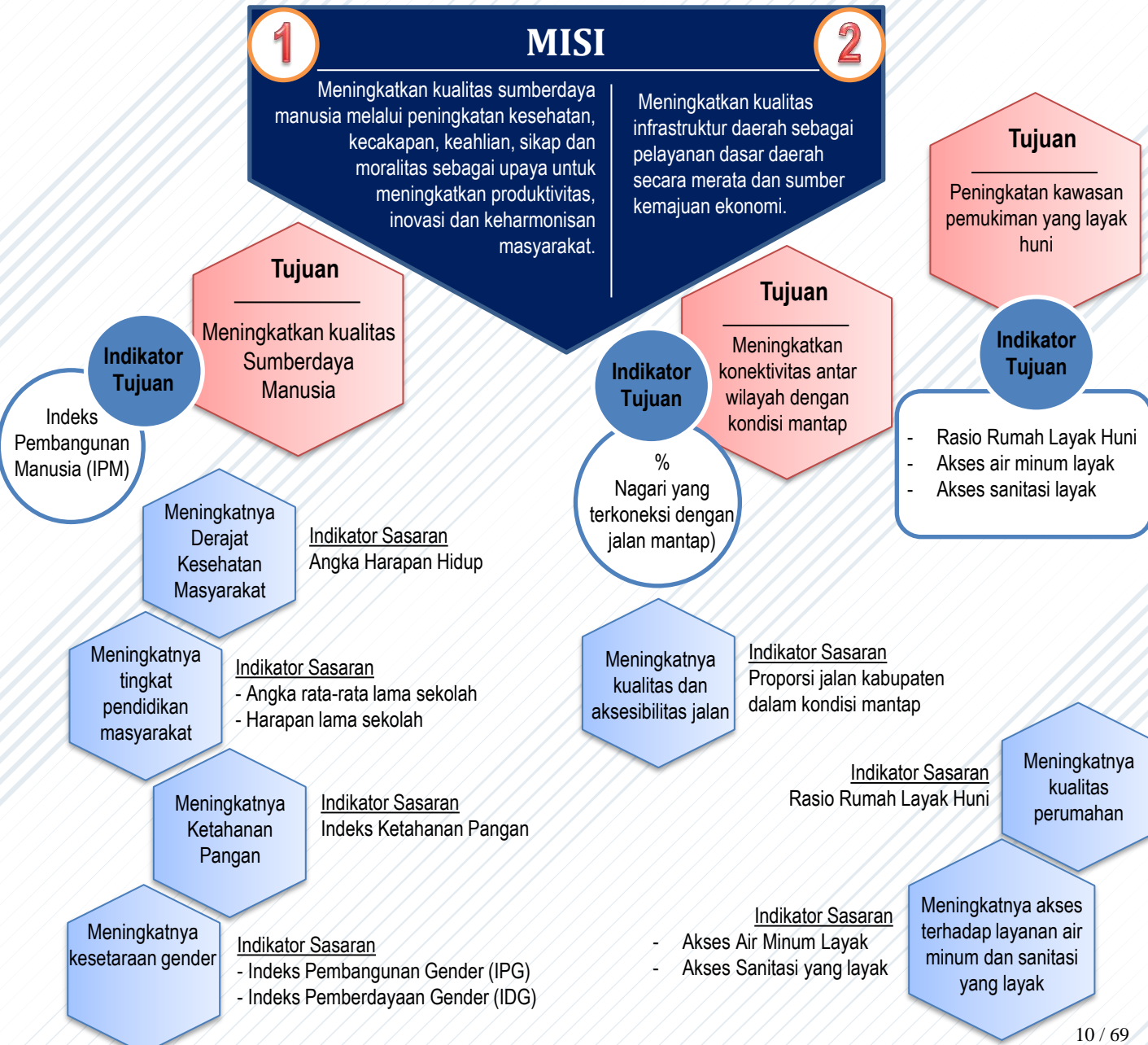
Dari Visi Menuju Dharmasraya yang mandiri dan berbudaya, lahirlah 7 misi untuk mencapai visi tersebut, dari 7 misi dijabarkan kembali menjadi 8 tujuan dengan 15 sasaran, dari ke 15 sasaran tersebut, didapatkan 25 indikator sasaran yang akan dijabarkan didalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Visi, Misi, serta tujuan dan sasaran ini telah tercantum dalam dokumen perencanaan RPJMD Tahun 2016-2021, dan merupakan acuan bagi seluruh perangkat daerah untuk menghasilkan kinerja yang berorientasi hasil dengan efektif dan efisien



B. KESELARASAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan, dari visi tersebut, dijabarkan menjadi misi yang diturunkan menjadi tujuan dan sasaran strategis, keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat dibawah ini:



3

MISI

4

Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar

Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Tujuan

- Pertumbuhan PDRB
- PDRB per Kapita
- Gini Ratio

Indikator Tujuan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tujuan

Menciptakan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Meningkatnya Daya Saing Dunia Usaha dan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Meningkatnya pemanfaatan pengelolaan, serta pengendalian fungsi lingkungan

Indikator Sasaran

- Indeks Kualitas lingkungan hidup

Indikator Sasaran

Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Indikator Sasaran

- Jumlah Koperasi Sehat
- Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas
- % IKM dg peningkatan Omset
- % Pasar dalam kondisi baik

Indikator Sasaran

Persentase Penduduk Miskin

5

MISI

7

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.

6

Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun

Tujuan

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah

Indikator Tujuan

Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)

Meningkatnya efektif & efisiensi pelaksanaan pembangunan

Indikator Sasaran

- %Capaian RPJMD
- Opini BPK terhadap laporan keuangan

Meningkatnya kualitas birokrasi pemerintahan

Indikator Sasaran

- Hasil evaluasi AKIP
- Nilai LPPD

Tujuan

pembangunan berbasis nagari

Indikator Tujuan

persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal

Meningkatkan status pembangunan nagari

Indikator Sasaran persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal

Tujuan

Pengelolaan khazanah dan warisan budaya serta adat untuk memperkuat identitas Dharmasraya

Indikator Tujuan

Jumlah cagar budaya yang ditetapkan

Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah

Indikator Sasaran

- Jumlah grup kesenian daerah yang dilestarikan
- Persentase Lembaga Adat Yang Akti
- Jumlah cagar budaya yang ditetapkan



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 mengacu pada dokumen Revisi RPJMD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2021, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Bupati Dharmasraya Tahun 2021

No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	71,46
2	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,65
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,24
3	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,23
4	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,15
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	50,73
5	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	63,33
6	Meningkatnya kualitas perumahan	Rasio rumah layak huni	Persen	89,00
7	Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak	Akses air minum layak	Persen	30,08
		Akses Sanitasi Layak	Persen	42,91
8	Meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	29,0

No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Target
9	Meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat	Jumlah Koperasi Sehat	Unit	30
		Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	Unit	40,0
		Persentase IKM dengan peningkatan Omset	%	6,5
		Persentase Pasar dalam kondisi baik	%	30,00
10	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Persen	5,62
11	Meningkatnya pemanfaatan, pengelolaan, serta pengendalian fungsi-fungsi lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,50
12	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan	Persentase Capaian RPJMD (IKU Daerah)	Persen	95,00
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WD P/TW/disclaimer	WTP
13	Meningkatnya kualitas Birokrasi Pemerintahan	Hasil evaluasi AKIP	Predikat/nilai	BB
		Nilai LPPD	Predikat/nilai	3,1226
14	Meningkatkan status pembangunan nagari	Persentase Nagari tertinggal dan sangat tertinggal	Persen	11,54
15	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	Jumlah grup kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	30
		Persentase Lembaga Adat Yang Aktif	Persen	100
		Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Unit	3

Dalam Rangka mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan program, kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian tersebut, banyaknya anggaran yang dialokasikan dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Tahun 2021

No	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	20	56	114.400.978.424
2	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	10	39	48.030.564.500
3	Meningkatnya ketahanan pangan	7	10	2.093.316.550
4	Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak	10	10	1.075.543.100
5	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	10	16	77.686.150.148
6	Meningkatnya kualitas perumahan	6	7	2.943.746.466
7	Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak	5	9	18.155.643.450
8	Meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB	6	14	7.060.888.867
9	Meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat	9	11	1.040.967.625
10	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	11	18	2.476.408.720
11	Meningkatnya kualitas mutu air, udara dan tutupan lahan	14	17	27.540.491.601
12	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan	15	142	86.691.548.174
13	Meningkatnya kualitas Birokrasi Pemerintahan	47	258	126.960.423.403
14	Meningkatkan status pembangunan nagari	3	11	1.577.962.330
15	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	9	12	3.487.032.230
TOTAL		182	630	521.221.665.588,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A

kuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan 15 sasaran strategis dengan 27 indikator kinerja yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan capaian kinerja pemerintah daerah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja	Prediket Kinerja
1	> 85	Sangat Berhasil
2	$70 < X \leq 85$	Berhasil
3	$55 < X \leq 70$	Cukup Berhasil
4	< 55	Tidak Berhasil

1. Capaian Kinerja berdasarkan target kinerja tahun 2021

Tabel 3. 1 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	2021			Rata2 Per Sasaran	Prediket
				Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	71,46	71,53	100,1	100,10	SANGAT BERHASIL
2	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,65	8,55	98,84	96,40	SANGAT BERHASIL
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,24	12,44	93,96		
3	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,23	78,13	96,18	96,18	SANGAT BERHASIL
4	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,15	88,31	97,96	99,11	SANGAT BERHASIL
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	50,73	50,87	100,27		
5	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	63,33	48,93	77,26	77,26	BERHASIL
6	Meningkatnya kualitas perumahan	Rasio rumah layak huni	Persen	89,00	91,98	103,35	103,35	SANGAT BERHASIL
7	Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak	Akses air minum layak	Persen	30,08	60,82	202,19	194,32	SANGAT BERHASIL
		Akses Sanitasi Layak	Persen	42,91	80,00	186,44		
8	Meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	29,0	27,00	106,9	106,9	SANGAT BERHASIL
9	Meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat	Jumlah Koperasi Sehat	Unit	30,0	35,00	116,67	116,81	SANGAT BERHASIL
		Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	Unit	40,0	40,00	100,0		
		Persentase IKM dengan peningkatan Omset	%	6,5	9,26	142,46		
		Persentase Pasar dalam kondisi baik	%	30,00	32,43	108,1		
10	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Persen	5,62	6,67	81,32	81,32	BERHASIL
11	Meningkatnya pemanfaatan, pengelolaan, serta pengendalian fungsi-fungsi lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,50	62,36	91,04	91,04	SANGAT BERHASIL
12	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan	Persentase Capaian RPJMD (IKU Daerah)	Persen	95	132	138,95	119,47	SANGAT BERHASIL
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP/TW/disclaimer	WTP	WTP	100,0		
13	Meningkatnya kualitas Birokrasi Pemerintahan	Hasil evaluasi AKIP	Predikat / nilai	BB	B	90,57	101,49	SANGAT BERHASIL
		Nilai LPPD	Predikat / nilai	3,1226	3,51	112,41		

NO	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	2021			Rata2 Per Sasaran	Prediket
				Targe t	Realis asi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Meningkatkan status pembangunan nagari	Persentase Nagari tertinggal dan sangat tertinggal	Persen	11,54	3,85	166,64	166,64	SANGAT BERHASIL
15	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	Jumlah grup kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	30	30	100,0	300,00	SANGAT BERHASIL
		Persentase Lembaga Adat Yang Aktif	Persen	100	100	100,0		
		Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Unit	3	21	700,0		

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa, dari 15 sasaran strategis yang ditetapkan, 13 diantaranya telah mendapatkan prediket Sangat Berhasil, hanya 2 sasaran yang mendapatkan prediket berhasil, yaitu sasaran Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas jalan, dan menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat. Untuk mengetahui capaian Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada table dibawah ini

2. Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah dalam tiga tahun terakhir

Tabel 3. 2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DALAM TIGA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2019-2021)

NO	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	CAPAIAN		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	100,13	100,1	100,1
2	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	99,76	98,8	98,84
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	96,28	95,1	93,96
3	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	100,00	97,7	96,18
4	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	98,63	98,3	97,96
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	100,71	99,6	100,27
5	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	89,20	90,55	77,26
6	Meningkatnya kualitas perumahan	Rasio rumah layak huni	%	103,99	103,7	103,35
7	Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak	Akses air minum layak	%	86,61	70,0	202,19
		Akses Sanitasi Layak	%	171,37	194,0	186,44
8	Meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	100,00	96,2	106,9
9	Meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat	Jumlah Koperasi Sehat	Unit	125,00	120,0	116,67
		Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	Unit	113,33	110,0	100,0
		Persentase IKM dengan peningkatan Omset	%	116,14	106,6	142,46
		Persentase Pasar dalam kondisi baik	%	108,04	115,8	108,1
10	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	98,06	94,2	81,32

NO	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	CAPAIAN		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
11	Meningkatnya pemanfaatan, pengelolaan, serta pengendalian fungsi-fungsi lingkungan hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,02	92,9	91,04
12	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan	Persentase Capaian RPJMD (IKU Daerah)	%	114,22	109,89	138,95
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP /TW/disclaimer	100,00	100,00	100,0
13	Meningkatnya kualitas Birokrasi Pemerintahan	Hasil evaluasi AKIP	Predikat/ nilai	100,00	89,4	90,57
		Nilai LPPD	Predikat/ nilai	105,05	106,36	112,41
14	Meningkatkan status pembangunan nagari	Persentase Nagari tertinggal dan sangat tertinggal	%	80,03	150,00	166,64
15	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	Jumlah grup kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	100,00	100,00	100,0
		Persentase Lembaga Adat Yang Aktif	%	100,00	100,00	100,0
		Jumlah cagar budaya yang dilestarikan DITETAPKAN	Unit	100,00	55,00	700,0

3. Capaian Kinerja berdasarkan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021

Tabel 3. 3 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET RPJMD TAHUN 2021

NO	SASARAN	Indikator kinerja	RPJMD TAHUN 2021			Target Akhir RPJMD 2021	Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	71,46	71,53	100,1	71,46	100,1
2	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	8,65	8,55	98,84	8,65	98,84
		Harapan Lama Sekolah	13,24	12,44	93,96	13,24	93,96
3	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	81,23	78,13	96,18	81,32	96,18
4	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	90,15	88,31	97,96	90,15	97,96
		Indeks Pemberdayaan Gender	50,73	50,87	100,27	50,734	100,27
5	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	63,33	48,11	77,26	63,33	77,26
6	Meningkatnya kualitas perumahan	Rasio rumah layak huni	89,00	91,98	103,35	89	103,35
7	Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak	Akses air minum layak	30,08	60,82	202,19	30,08	202,19
		Akses Sanitasi Layak	42,91	80,00	186,44	42,91	186,44
8	Meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	29,0	27,00	106,9	29	106,9
9	Meningkatkan daya saing dunia usaha dan	Jumlah Koperasi Sehat	30	35,00	116,67	30	116,67

NO	SASARAN	Indikator kinerja	RPJMD TAHUN 2021			Target Akhir RPJMD 2021	Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
	kelembagaan ekonomi masyarakat	Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	40	40,00	100,0	40	100,0
		Persentase IKM dengan peningkatan Omset	6,5	9,26	142,46	6,50	142,46
		Persentase Pasar dalam kondisi baik	30	32,43	108,1	30	108,1
10	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	5,62	6,67	81,32	5,62	81,32
11	Meningkatnya pemanfaatan, pengelolaan, serta pengendalian fungsi-fungsi lingkungan hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	68,50	62,36	91,04	68,50	91,04
12	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan	Persentase Capaian RPJMD (IKU Daerah)	95	132	138,95	95	138,95
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100,0	WTP	100,0
13	Meningkatnya kualitas Birokrasi Pemerintahan	Hasil evaluasi AKIP	BB	B	90,57	BB	90,57
		Nilai LPPD	3,1226	3,51	112,41	3,1226	112,41
14	Meningkatkan status pembangunan nagari	Persentase Nagari tertinggal dan sangat tertinggal	11,54	3,85	166,64	11,54	166,64
15	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	Jumlah grup kesenian daerah yang dilestarikan	30	30	100,0	30	100,0
		Persentase Lembaga Adat Yang Aktif	100	100	100,0	100	100,0
		Jumlah cagar budaya yang dilestarikan DITETAPKAN	3	21	700,0	3	700,0

4. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KABUPATEN DHARMASRAYA DENGAN PROVINSI SUMATERA BARAT DAN NASIONAL

Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

NO	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi		
				Dharmasraya	Provinsi Sumbar	Nasional
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	71,53	69,59	71,57
2	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,55	9,07	8,54
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,44	14,09	13,08
3	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,13	75,43	72,3
4	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,31	94,17	91,06
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	50,87	58,29	75,57
5	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	48,11	73	92,2

NO	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi		
				Dharmasraya	Provinsi Sumbar	Nasional
1	2	3	4	5	6	7
6	Meningkatnya kualitas perumahan	Rasio rumah layak huni	Persen	91,98	96,2	95,9
7	Meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	27,00	21,83	12,4
8	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Persen	6,67	6,04	9,71

Dari table diatas dapat disimpulkan beberapa poin yang menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan Capaian Provinsi dan Nasional antara lain

1. Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya jauh lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat, namun masih beberapa poin di bawah angka harapan hidup Nasional
2. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Dharmasraya berada dibawah angka Provinsi namun lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata lama sekolah secara Nasional
3. Harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya berada dibawah capaian Provinsi maupun Nasional
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Dharmasraya berada dibawah capaian Provinsi dan capaian Nasional
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dharmasraya berada dibawah capaian Provinsi dan capaian Nasional
6. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Dharmasraya masih lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi namun jauh lebih rendah dibandingkan persentase penduduk miskin secara Nasional

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Tabel 3. 5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN ALTERNATIF SOLUSI TAHUN 2021

NO	SASARAN	Capaian Sasaran	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN	SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100,10	<p>Penyebab keberhasilan sasaran ini antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan Kesehatan, seperti pemenuhan rasio jumlah puskesmas dengan masyarakat, Puskesmas di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 14 Puskesmas, dengan 2 Rumah Sakit Daerah 2. Meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan dengan peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan serta pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar, seta seluruh puskesmas di Kabupaten Dharmasraya telah terakreditasi 3. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular dengan pelaksanaan kegiatan preventif atau pencegahan kepada masyarakat 	Meskipun telah sangat berhasil, beberapa permasalahan dalam pencapaian sasaran ini masih ditemui seperti, kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut memelihara Kesehatan sendiri dan orang sekitar, beberapa solusi yang telah dilakukan adalah, pembentukan Posyandu Remaja, Germas Zone, hal ini diharapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengubah paradigma masyarakat untuk dapat menjaga Kesehatan masing-masing
2	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	96,40	<p>Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. APK SMP/MTs 93,3 2. APK PAUD 44,01 3. APK SD/MI 106,83 4. APM SD/MI 99,04 5. APM SMP/MTs 76,76 6. jumlah sekolah 357 7. rasio murid : guru 11,708 	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar Rp.107.996.000, kegiatan pengelolaan Pendidikan dasar, Pendidikan sekolah menengah pertama, Pendidikan anak usia dini, serta Pendidikan nonformal, dengan total 30 kegiatan dan anggaran yang di alokasikan sebesar Rp.47.319.192.250,-
3	Meningkatnya ketahanan pangan	96,18	<p>Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Beras 28,353 ton 2. Kebutuhan Beras 12,875 ton 3. Cadangan Pangan daerah 27,89 ton 4. Kebutuhan penyediaan cadangan pangan daerah 99,63 5. Indeks Keterjangkauan 89,89 	Keberhasilan ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memang sangat komitmen untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Berbagai program digelar seperti penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota, program penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan

NO	SASARAN	Capaian Sasaran	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN	SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
1	2	3	4	5
			<p>6. Indeks Pemanfaatan 70,95</p> <p>7. Indeks Ketersediaan 75,96</p>	kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan
4	Meningkatnya kesetaraan gender	99,11	Capaian ini tidak mencapai 100% salah satunya disebabkan oleh keterlibatan perempuan didalam parlemen, dari 30 orang anggota parlemen di Kabupaten Dharmasraya, hanya 2 (dua) atau 6% anggota perempuan, hal ini sangat jauh dari standar minimal sebesar 30% kuota perempuan di parlemen.	Peranan perempuan dan laki-laki dapat lebih proporsional dalam merencanakan, mengelola dan mengendalikan kehidupan keluarga. Program peningkatan pendidikan politik masyarakat. Program ini dinilai cukup berhasil dengan tampilnya kaum perempuan di lembaga wakil rakyat. Program peningkatan peran serta kepemudaan juga mendorong peningkatan sasaran ini. Selain itu, untuk mencapai kinerja penyetaraan gender ini pelaksanaan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, seperti pemberdayaan organisasi wanita, PKK, dasawisma dan organisasi wanita lainnya juga dilaksanakan.
5	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	77,26	<p>Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (DAK Fisik) Ruas : 00008560 – Simp. 14 – Batu Rijal 8,045 km 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket I (Kecamatan Sembilan Koto,Pulau Punjung & Sitiung) 99 Km 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket II (Kecamatan Koto Baru, Koto Salak, Timpeh, Padang Laweh dan Kecamatan Tiumbang) 74,00 Km 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket III (Kecamatan Koto Besar, Sungai Rumbai dan Kecamatan Asam Jujuhan) 75,93 km 	Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah dengan pembangunan jalan dan jembatan, perbaikan dan perawatan jalan Kabupaten dan juga keberhasilan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam mendorong agar nagari ikut melakukan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah masing masing. Dengan demikian, akses jalan dan proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Dharmasraya makin baik.
6	Meningkatnya kualitas perumahan	103,35	<p>Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya lingkungan hunian sehat yang dilengkapi PSU 2. Menurunnya jumlah rumah tangga MBR yang tidak memiliki hunian (backlog) 3. Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan pemerintah daerah 	Pemberian bantuan untuk rehab rumah tidak layak huni. Selain itu pemerintah juga mendorong masyarakat untuk secara mandiri membenahi rumahnya agar masuk dalam standar rumah layak huni. Melalui komunitas perumahan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengembangkan rumah layak huni. Penataan kawasan perumahan juga

NO	SASARAN	Capaian Sasaran	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN	SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
1	2	3	4	5
			4. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	mendorong adanya kesadaran masyarakat untuk membangun dan merehabilitasi rumah mereka sehingga bisa menjadi rumah layak huni.
7	Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak	194,32	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPAM yang dikelola oleh UPT SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari Sambungan Rumah (SR) jumlah penduduk terlayani sebanyak 7.525,- jiwa dengan persentase tingkat pelayanan capaiannya sebesar 3,07 % 2. SPAM Pamsimas yang dikelola oleh masyarakat, jumlah penduduk yang terlayani adalah sebanyak 32.452,- jiwa dengan persentase tingkat pelayanan dengan capaiannya sebesar 13,24 % 3. Masyarakat terlayani jaringan perpipaan sebanyak 23,85% 4. Masyarakat terlayani sumber air minum bukan jaringan perpipaan sebanyak 36,97% 	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mendorong kelompok masyarakat untuk membangun sistem pengelolaan air bersih berbasis masyarakat (Pamsimas). Inventarisasi sumber air baku juga terus dilakukan. Pengalokasian anggaran yang proporsional terhadap pengembangan Pamsimas, telah mendorong naiknya akses masyarakat untuk mendapatkan akses sanitasi yang layak.
8	Meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB	106,9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi Padi 40797,1746 Ton 2. Produksi Jagung 12124,9728 Ton 3. Produksi Duku 2613,78 Ton 4. Produksi Jeruk 235,92 Ton 5. Produksi Cabe 391,2 Ton 6. Produksi Karet 25888,271591 Ton 7. Produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat) 103279,1 Ton 8. Produksi Kakao 2366,7606775 Ton 9. Produksi daging 1558,8 Ton 10. Produktivitas Padi Sawah 4,45 Kui/Ha 11. Indeks penanaman padi sawah 1,76 Kali/Ha 12. Luas panen padi sawah 9149,4 Ha 13. Produktivitas Sawit 4,59511769581573 Ton/Ha 14. Luas Perkebunan Sawit (kebun rakyat) 32743,64 Ha 15. Luas Perkebunan Karet 40974,48 Ha 16. Luas Perkebunan Kakao 3758,9 Ha 17. Populasi Sapi/Kerbau 51380 Ekor 18. Kelompok Tani Naik Kelas 67 Kelompok 19. Penumbuhan Kelembagaan Petani 93 Kelompok 	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyelenggarakan intensifikasi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam usaha budidaya tanaman pangan, peternakan, perikanan dan juga perkebunan. Selain melaksanakan intensifikasi, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga melaksanakan ekstensifikasi. Dengan demikian produksi pertanian bisa meningkat dan juga pendapatan petani meningkat. Di luar itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga membangun jaringan irigasi, mendorong pemberian modal oleh perbankan, membangun pasar dan sarana perhubungan serta mengintroduksi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil. Upaya ini juga mendorong makin besarnya nilai tukar petani di Kabupaten Dharmasraya.

NO	SASARAN	Capaian Sasaran	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN	SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
1	2	3	4	5
9	Meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat	116,81	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya saing koperasi dan UKM Persentase koperasi aktif 45 % <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah koperasi sehat 30 b. Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas 40 2. Meningkatkan aktifitas perdagangan dan perlindungan konsumen <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase dalam kondisi baik 30 % b. Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu ≤ 8 c. Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah 800 3. Mewujudkan IKM yang menghasilkan nilai tambah dan manfaat bagi perekonomian masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase IKM dengan peningkatan omzet 6,50% b. Persentase pertumbuhan IKM 7,79 % c. Jumlah sentra industri yang dibina 	Mendorong terwujudnya kemitraan antara pengusaha mikro dengan pengusaha kecil menengah, terutama dalam pemasaran produksi, mendorong pemanfaatan modal perbankan dan kontribusi koperasi dalam permodalan, selain itu permodalan dari CSR perusahaan perusahaan besar yang ada di daerah. Langkah lainnya menyangkut regulasi, dimana perizinan dan keamanan dipermudah dan distabilkan. Selain itu, juga membantu peningkatan efisiensi biaya produksi, sekaligus meningkatkan produksi dengan cara menyediakan bahan baku yang lebih murah melalui kerjasama dengan koperasi, mendorong agar seluruh ASN memakai produk batik yang diproduksi oleh UKM di Kabupaten Dharmasraya
10	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	81,32	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan keterampilan anak terlantar dan putus sekolah 2. VERIVALI masyarakat miskin 132.519 Jiwa 3. bantuan pangan non tunai 25.633 KPM 4. <i>capacitybuilding</i> pendamping sosial 11 TKSK 52 PSM 5. penguatan LKSS dan LK3* 11 LKS, 1 LKKS, 1 LK3 6. bantuan fakir miskin 86.491 KPM 7. Jumlah Pelatihan Balai Latihan Kerja 24 Paket 8. jumlah alumni pelatihan yang kompeten 217 Orang 9. jumlah penempatan tenaga kerja oleh Dinas Tenaga Kerja 4.400 Orang 	Program sektoral terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat juga cukup berhasil, di antaranya intensifikasi pertanian, pengembangan usaha kecil dan menengah dan juga membaiknya iklim usaha di Kabupaten Dharmasraya. Ini secara tidak langsung telah menambah pendapatan masyarakat, termasuk masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan
11	Meningkatnya pemanfaatan, pengelolaan, serta pengendalian fungsi-fungsi lingkungan hidup	91,04	<ol style="list-style-type: none"> 1. persentase timbulan sampah yang tertangani 78.71 % 2. jumlah kawasan sumber daya air yang harus dilindungi 0.25 Ha 3. jumlah kawasan sumber daya lahan yang harus dilindungi 0.25 Ha 4. persentase menurunnya lahan kritis 0.25 Ha 	Pembentukan tim tanggap bencana untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh bencana alam, serta Menyusun dokumen perencanaan daerah dengan mempedomani KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

NO	SASARAN	Capaian Sasaran	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN	SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
1	2	3	4	5
12	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan	119,47	Pencapaian ini didukung oleh komitmen yang sangat tinggi terhadap kepatuhan dalam melaksanakan seluruh peraturan yang menyangkut dengan akuntansi pemerintah. Pengelolaan keuangan di Kabupaten Dharmasraya telah dilaksanakan dengan memenuhi standar akuntansi pemerintah	Pengelolaan keuangan di Kabupaten Dharmasraya telah dilaksanakan dengan memenuhi standar akuntansi pemerintah. Ini dimungkinkan karena pemerintah daerah terus mendorong ASN untuk meningkatkan ilmu pengetahuan terkait dengan akuntansi keuangan. Selain itu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan agar pengelolaan keuangan benar benar memenuhi standar akuntansi negara.
13	Meningkatnya kualitas Birokrasi Pemerintahan	101,49	Reformasi birokrasi di Kabupaten Dhamrasraya telah dilakukan secara terus menerus dan menyeluruh	Meningkatnya kualitas birokrasi pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 47 Program dan 258 Kegiatan
14	Meningkatkan status pembangunan nagari	166,64	Komitmen Pimpinan dan juga pemangku kebijakan terkait untuk meningkatkan status Dharmasraya menjadi Kabupaten yang lebih baik lagi, beberapa factor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain, Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Lingkungan serta Indeks ketahanan Ekonomi di Kabupaten Dharmasraya telah mumpuni untuk menjadikan Dharmasraya sebagai Kabupaten yang Maju, saat ini, hanya 2 Desa yang menjadi perhatian daerah untuk ditingkatkan statusnya	Seteah mendapatkan prediket Kabupaten maju sesuai dengan indeks desa membangun, Kabupaten Dharmasraya focus untuk membina 2 desa yang masih mendapatkan prediket desa tertinggal dan sangat tertinggal
15	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	300,00	Kerjasama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Bidang Kebudayaan, bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat di Batusangkar dan Balai Arkeologi Sumatera Utara di Medan.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus membangun kerjasama dengan lembaga - lembaga kepurbakalaan agar dapat membantu menetapkan cagar budaya dan melestarikannya untuk keperluan wisata, penelitian dan juga pembelajaran (<i>education</i>).

6. Analisis efisiensi dan efektifitas Sumberdaya dalam mencapai kinerja

1. Efisiensi Keuangan

Tabel 3. 6 EFISIENSI KEUANGAN TERHADAP CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

No.	SASARAN	CAPAIAN RATA2 (2020)	realisasi anggaran 2020 (Rp)	CAPAIAN RATA2 (2021)	REALISASI ANGGARAN 2021 (Rp)	anggaran untuk 1% kinerja 2021	anggaran untuk 1% kinerja 2020	selisih tahun 2020-2021	PREDIKET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100,14	102.720.378.831	100,1	63.766.345.048	637.026.424	1.025.767.714	- 388.741.289	efisien
2	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	96,97	49.641.504.141	96,4	46.375.349.837	481.072.094	511.926.412	- 30.854.318	efisien
3	Meningkatnya ketahanan pangan	97,7	3.295.616.205	96,18	2.088.338.300	21.712.812	33.731.998	- 12.019.186	efisien
4	Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak	98,95	1.532.773.423	99,11	1.043.816.321	10.531.897	15.490.383	- 4.958.486	efisien
5	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	90,55	41.541.730.664	77,26	70.980.669.237	918.724.686	458.771.183	459.953.502	kurang efisien
6	Meningkatnya kualitas perumahan	103,66	2.624.983.561	103,35	2.594.023.134	25.099.401	25.323.013	- 223.612	efisien
7	Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak	132,03	8.254.836.277	194,32	16.827.615.446	86.597.445	62.522.429	24.075.016	kurang efisien
8	Meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB	96,22	3.501.185.277	106,9	6.981.374.162	65.307.523	36.387.292	28.920.230	kurang efisien
9	Meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat	113,09	4.947.156.110	116,81	945.314.497	8.092.753	43.745.301	- 35.652.548	efisien
10	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	94,23	2.411.095.784	81,32	2.418.461.920	29.740.063	25.587.348	4.152.715	kurang efisien
11	Meningkatnya kualitas mutu air, udara dan tutupan lahan	92,94	2.856.185.892	91,04	3.179.177.631	34.920.668	30.731.503	4.189.165	kurang efisien
12	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan	104,95	63.792.278.329	119,47	82.952.250.284	694.335.400	607.834.953	86.500.447	kurang efisien
13	Meningkatnya kualitas Birokrasi Pemerintahan	97,88	59.291.597.735	101,49	68.353.573.035	673.500.572	605.758.048	67.742.524	kurang efisien
14	Meningkatkan status pembangunan nagari	150	2.721.247.355	166,67	1.566.387.169	9.398.135	18.141.649	- 8.743.514	efisien
15	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	85	1.950.824.675	300	3.435.145.359	11.450.485	22.950.879	- 11.500.394	efisien
TOTAL		103,62	351.083.394.259	123,36	373.507.841.379	3.027.754.575	3.388.159.964	360.405.389	efisien

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan kegiatan dengan efektif dan telah mengefisienkan anggaran, pada tahun 2020, untuk mendapatkan 1% pencapaian, rata-rata mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 3.388.159.964, sedangkan tahun 2021, untuk mendapat 1% pencapaian, mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 3.027.754.575, artinya, untuk mendapatkan 1% pencapaian di tahun 2021 Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan sebesar Rp. 360.405.389 dibandingkan dari tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa, alokasi Anggaran di Kabupaten Dharmasraya telah sesuai dengan sasaran strategis yang di rencanakan.

2. Efektifitas Kegiatan

Tabel 3. 7 EFEKTIFITAS KEGIATAN TAHUN 2021

NO	SASARAN	KEGIATAN 2020	kegiatan 2021	capaian 2020	capaian 2021	analisis efektifitas
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	62	56	100,14	100,10	efektif
2	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	52	39	96,97	96,40	efektif
3	Meningkatnya ketahanan pangan	17	10	97,7	96,18	efektif
4	Meningkatnya kesetaraan gender	15	10	98,95	99,11	efektif
5	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	14	16	90,55	77,26	kurang efektif
6	Meningkatnya kualitas perumahan	10	7	103,66	103,35	efektif
7	Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak	10	9	132,03	194,32	efektif
8	Meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB	13	14	96,22	106,90	efektif
9	Meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat	11	11	113,09	116,81	efektif
10	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	15	18	94,23	81,32	kurang efektif
11	Meningkatnya kualitas mutu air, udara dan tutupan lahan	20	17	92,94	91,04	efektif
12	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan	198	142	104,95	119,47	efektif
13	Meningkatnya kualitas Birokrasi Pemerintahan	454	258	97,88	101,49	efektif
14	Meningkatkan status pembangunan nagari	21	11	150	166,67	efektif
15	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	12	12	85	300,00	efektif
	TOTAL KEGIATAN	924	630	103,62	123,36	efektif

Dari tabel diatas dapat disimpulkan secara keseluruhan, Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan kegiatan secara efektif ditahun 2021. Namun masih ada 2 sasaran yang belum efektif dibandingkan dengan kegiatan di tahun 2020, ke-2 (dua) sasaran dengan kegiatan yang belum efektif tersebut antara lain adalah ;

- a. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas jalan
- b. Menurunnya tingkat kemiskinan

Kurang efektifnya kegiatan untuk mencapai (dua) sasaran tersebut karena kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2021 belum menghasilkan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, hal ini dipengaruhi oleh focus pemerintah untuk memulihkan keadan Kabupaten Dharmasraya Pasca Pandemi Covid-19

3. Efisiensi SDM/Aparatur

Tabel 3. 8 EFISIENSI SUMBER DAYA APARATUR

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Kebutuhan Berdasarkan ABK	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1	2	3	4	5
	Jumlah Seluruhnya	7.420	3410	4.010
1	SEKRETARIAT DAERAH	144	63	81
2	SEKRETARIAT DPRD	32	17	15
3	INSPEKTORAT	122	33	89
4	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	51	21	30
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	59	40	19
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	19	8	11
7	BADAN KEUANGAN DAERAH	84	43	41
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	77	26	51
9	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17	9	8
10	DINAS PENDIDIKAN	2.401	1753	648
11	DINAS KESEHATAN	2.073	559	1.514
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	62	22	40
13	DINAS PERTANIAN	247	101	146
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	89	19	70
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	93	49	44
16	DINAS PERHUBUNGAN	79	26	53
17	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	183	28	155
18	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	38	21	17
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	61	26	35
20	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	113	27	86
21	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	59	21	38
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	67	26	41
23	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	44	16	28
24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	36	21	15
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	89	21	68
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	61	24	37
27	KECAMATAN ASAM JUJAHAN	28	9	19
28	KECAMATAN IX KOTO	29	14	15
29	KECAMATAN KOTO BARU	28	15	13
30	KECAMATAN KOTO BESAR	30	18	12

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Kebutuhan Berdasarkan ABK	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
31	KECAMATAN KOTO SALAK	28	12	16
32	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	28	15	13
33	KECAMATAN SITIUNG	30	17	13
34	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	28	13	15
35	KECAMATAN TIMPEH	28	11	17
36	KECAMATAN TIUMANG	27	14	13
37	KECAMATAN PADANG LAWEH	26	10	16
38	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH	710	242	468

Sumber: BKPSDM Kabupaten Dharmasraya 2021

Capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 sebesar 123,36%, capaian ini berhasil dicapai dengan keterbatasan pegawai, jumlah pegawai di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 3.410 orang, sedangkan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja sebanyak 7,420 atau sebesar 47% dari kebutuhan pegawai, artinya untuk mendapatkan capaian kinerja yang didapatkan di tahun 2021, pegawai Kabupaten Dharmasraya telah bekerja dengan efektif dengan beban kerja 2 (dua) kali lipat beban kerja yang seharusnya.

1. SASARAN MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

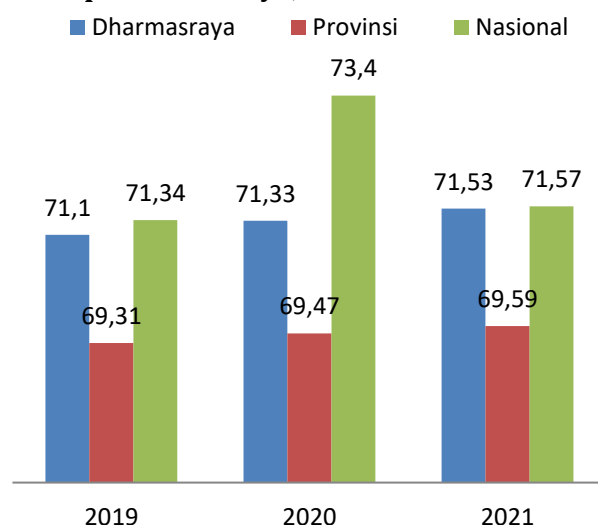
INDIKATOR USIA HARAPAN HIDUP



Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur dengan indikator angka harapan hidup atau usia harapan hidup. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 71,46 tahun bisa dicapai 71,53 tahun dengan capaian kinerja sebesar 100,10 persen dari target yang ditetapkan. Capaian nilai mean **92,5** dengan katagori **sangat berhasil**.

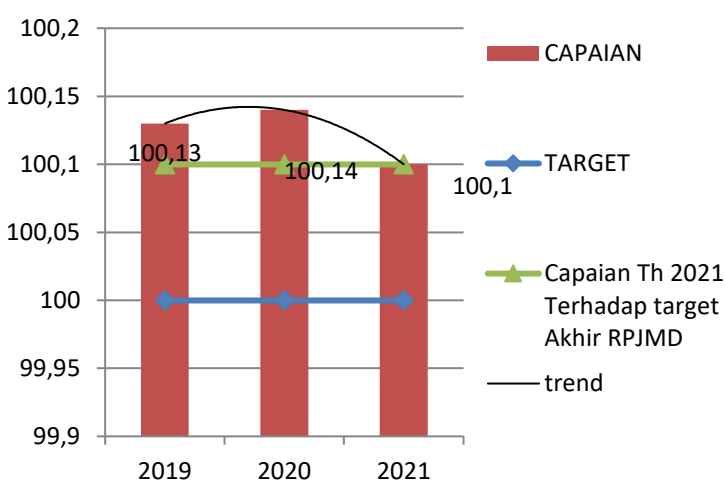
Dibandingkan dengan keadaan Provinsi capaian Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan usia harapan hidup masyarakat melampaui rata rata usia harapan hidup provinsi Sumatera Barat tahun 2021 yaitu sebesar 69,59 tahun. Jika dibandingkan dengan usia harapan hidup nasional, capaian Kabupaten Dharmasraya masih dibawah capaian nasional dimana angka harapan hidup secara nasional adalah 71,54 tahun

Perbandingan Capaian Angka Harapan Hidup Dharmasraya, Provinsi dan Nasional

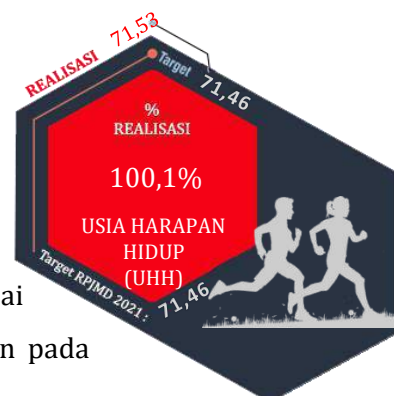


Sumber: Badan Pusat Statistik Dharmasraya; 2021

Capaian Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2019-2021



Jika dilihat dari capaian berdasarkan target yang ditetapkan, capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan usia harapan hidup masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya, jika dibandingkan capaian tahun 2021 dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021, Capaian usia harapan Hidup sudah mencapai Hasil yang diharapkan pada Akhir masa RPJMD

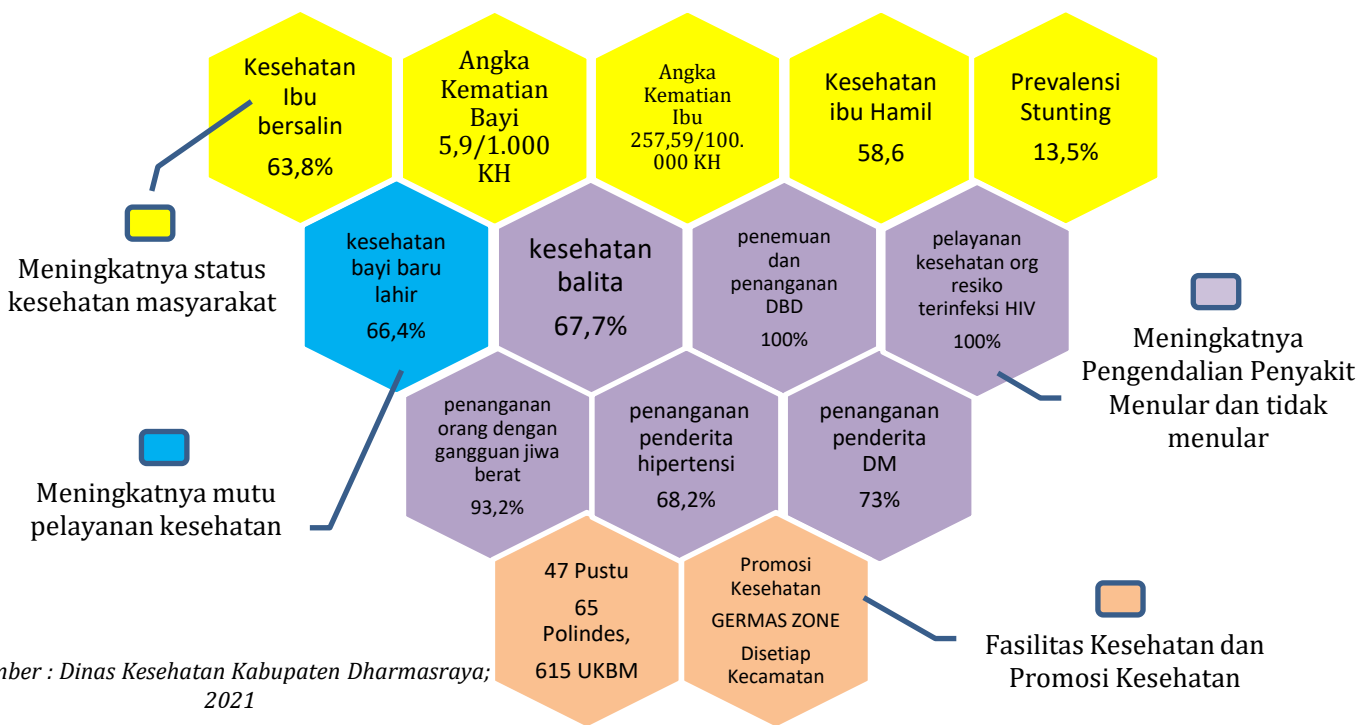


Sumber: BPS Dharmasraya; 2021

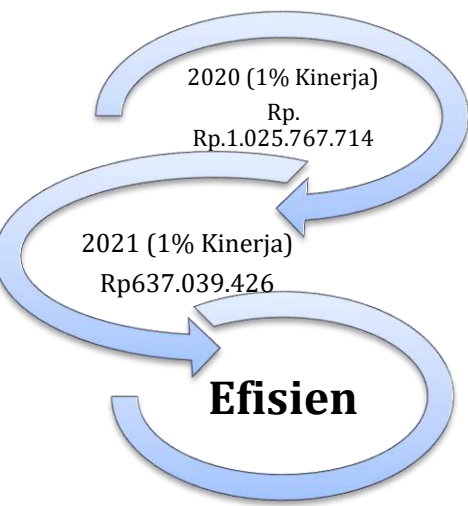
Capaian tersebut terealisasi berkat ada upaya Pemerintah untuk mendorong pelaksanaan pola hidup sehat secara masif. Pemasyarakatan pola hidup sehat ini dilakukan melalui kegiatan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).

Setiap bulan dilaksanakan Germas di ibukota Kecamatan dan selalu dipergilirkan, agar bisa menjangkau masyarakat di seluruh Kabupaten. Selain melalui Germas, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga mengintensifkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Rumah Sakit. Peningkatan layanan kesehatan ini dilakukan dengan cara melengkapi peralatan kesehatan yang lebih moderen, peningkatan biaya operasional layanan kesehatan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan petugas kesehatan, petugas medis dan paramedis. Bahkan untuk mencapai standar layanan kesehatan yang baik, semua unit layanan kesehatan sudah distandardisasi.

Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat



Keberhasilan pencapaian meningkatnya usia harapan hidup di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 20 Program dan 56 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 114.400.978.424



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dinilai efektif dan efisien. Jika dibandingkan di tahun 2020, untuk mencapai 1% kinerja dibutuhkan anggaran sebesar Rp.1.025.767.714 dengan 62 Kegiatan, sedangkan ditahun 2021, untuk mencapai 1% kinerja, membutuhkan anggaran Rp. 637.026.424 dengan 56 Kegiatan, jadi dapat disimpulkan untuk mencapai 1% kinerja sasaran ke-1, Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan anggaran sebesar Rp. 388.741.289 dan memangkas 6 kegiatan.

2. SASARAN MENINGKATNYA TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT

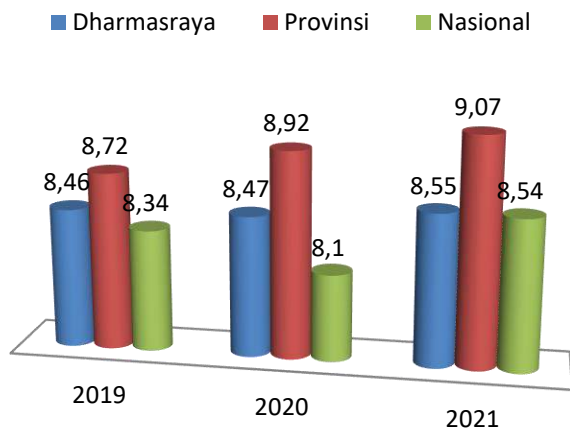


Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat diukur dengan dua indikator, yaitu angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Untuk indikator angka rata-rata lama sekolah ditarget 8,65 tahun. Berhasil direalisasikan 8,55 tahun, dengan capaian 98,84%. Untuk indikator harapan lama sekolah ditetapkan 13,24 tahun terealisasi 12,44 tahun dengan capaian 93,96 persen. Dengan mean dalam sasaran ini sebesar 92,5 maka capaian dari sasaran di atas dikategorikan **sangat berhasil**.

INDIKATOR ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2021 ditarget 8,65 tahun. Berhasil direalisasikan 8,55 tahun, dengan capaian 98,84% dengan kategori sangat berhasil, bahkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021, capaian angka lama sekolah sudah mencapai 98,84% dari target akhir RPJMD. Jika dilihat dari pencapaian selama 3 tahun terakhir, pencapaian kinerja angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan ditahun 2021.

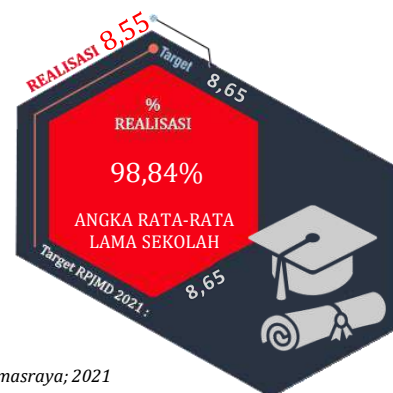
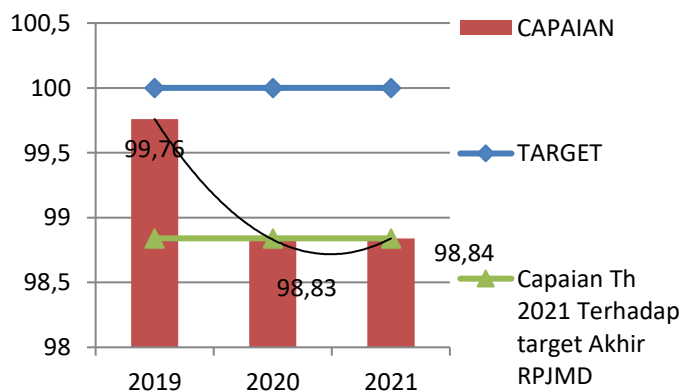
Perbandingan Capaian Angka Lama Sekolah Dharmasraya, Provinsi dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik Dharmasraya; 2021

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 masih berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat, namun angka lama sekolah ini sudah hampir melampaui pencapaian nasional yaitu sebesar 8,54 tahun.

Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019-2021

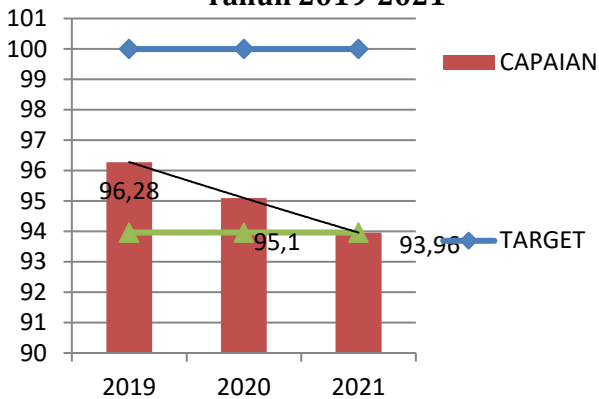


Sumber: BPS Dharmasraya; 2021

INDIKATOR HARAPAN LAMA SEKOLAH

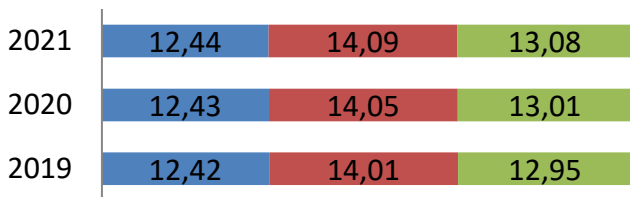
Penghitungan Angka harapan lama sekolah bertujuan untuk mengetahui harapan anak-anak usia tertentu untuk bersekolah. Indikator tersebut menggambarkan mengenai kualitas lembaga pendidikan yang dikaitkan dengan kemungkinan anak dalam usia tertentu dapat menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Dengan demikian, kualitas lembaga pendidikan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat dari seberapa lama anak usia sekolah bisa mengenyam pendidikan.

Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2021



Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dibanding Angka Provinsi dan Nasional

■ Dharmasraya ■ Sumbar ■ Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik Dharmasraya; 2021

Besarnya capaian sasaran meningkatnya tingkat pendidikan

masyarakat ini tidak lepas dari adanya upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam peningkatan kualitas lembaga pendidikan. Dalam setahun terakhir ini,

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan kegiatan Pemerataan

Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan

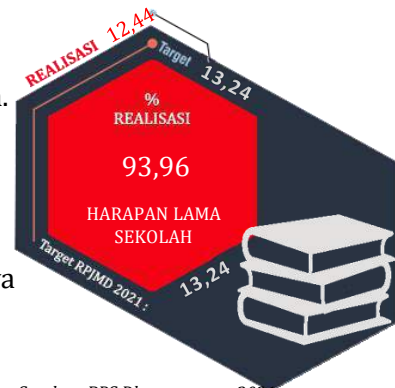
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar Rp.107.996.000, kegiatan pengelolaan Pendidikan dasar, Pendidikan sekolah menengah pertama, Pendidikan anak usia dini, serta Pendidikan nonformal, dengan total 30 kegiatan dan anggaran yang di alokasikan sebesar Rp.47.319.192.250,-

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melaksanakan sosialisasi masif untuk

memberikan kesadaran kepada masyarakat dan para orang tua, agar dapat mengikuti program wajib belajar 9 tahun, bagi masyarakat yang putus sekolah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berusaha terus mendorong penduduk usia sekolah untuk mengikuti pendidikan kejar paket A dan paket B. Bahkan menyekolahkan anak-anak dari suku anak dalam agar seluruh masyarakat mendapatkan hak yang sama untuk Pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, angka harapan lama sekolah yang berhasil dicapai Kabupaten Dharmasraya adalah 12,44 tahun dari target 13,24 tahun. Ini berarti capaian angka harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya sangat berhasil (93,96 persen). Jika dibandingkan dengan capaian 3 tahun terakhir, kinerja capaian harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya mengalami penurunan setiap tahunnya dari target yang ditetapkan

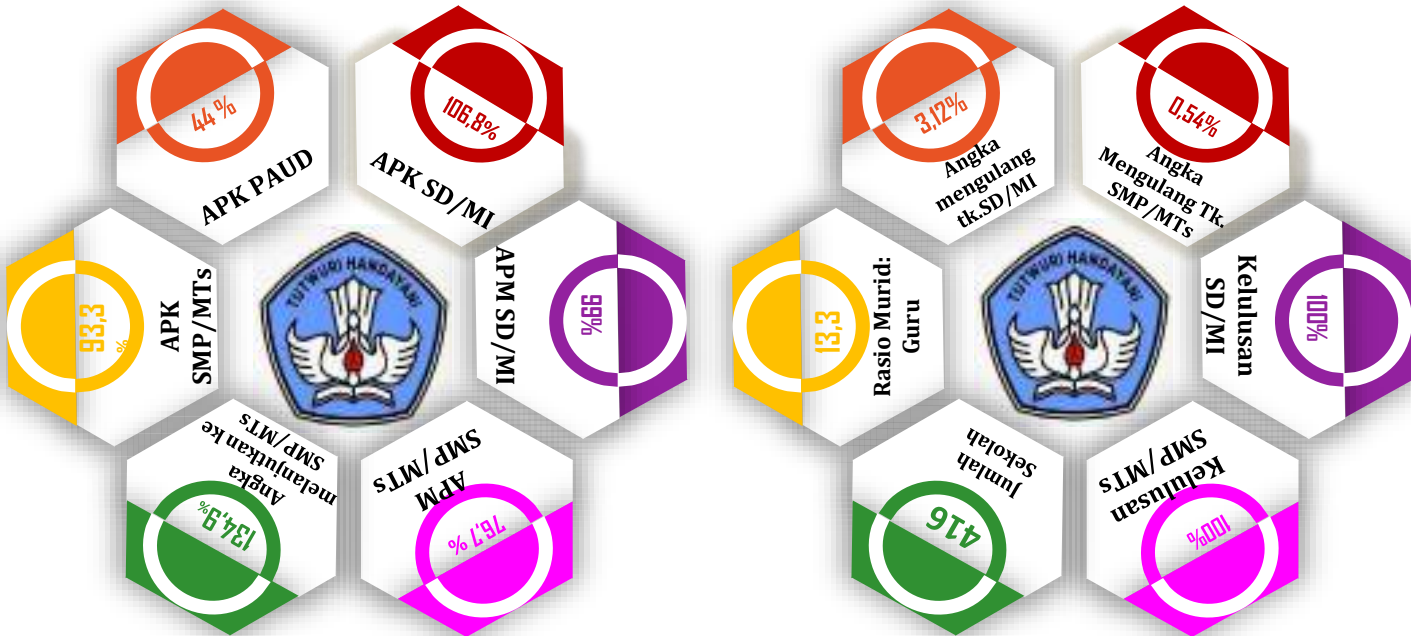
Dibanding angka harapan lama sekolah tingkat provinsi dan Nasional, capaian Dharmasraya masih berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat. Bahkan jika dibanding dengan angka nasional, angka harapan lama sekolah masih berada di bawahnya sebesar 13,08. Ini perlu upaya lebih keras lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Dharmasraya.



Sumber: BPS Dharmasraya; 2021

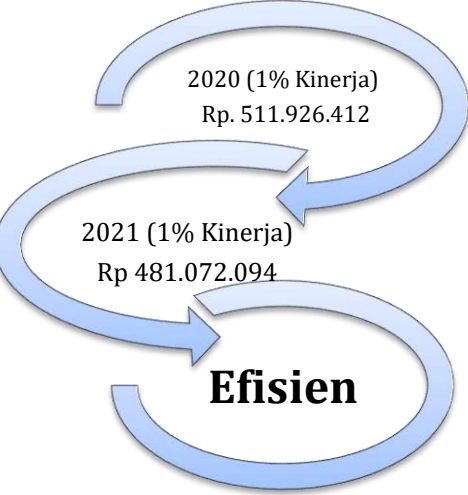


**Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian
Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat**



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya; 2021

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 10 Program dan 39 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp 48.030.564.500



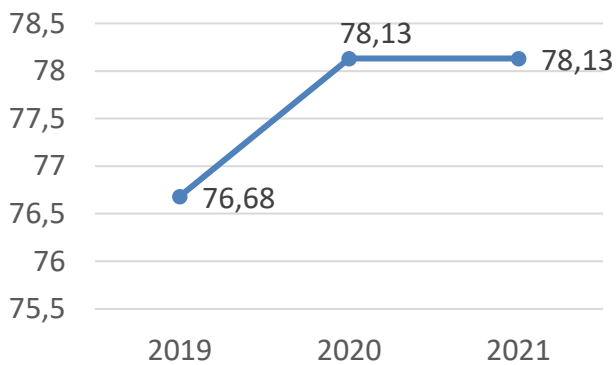
Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat dinilai efektif dan efisien. Jika dibandingkan di tahun 2020, untuk mencapai 1% kinerja dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 511.926.412 dengan 52 Kegiatan, sedangkan ditahun 2021, untuk mencapai 1% kinerja, membutuhkan anggaran Rp. 481.072.094 dengan 39 Kegiatan, jadi dapat disimpulkan untuk mencapai 1% kinerja sasaran ke-2, Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan anggaran sebesar Rp. 30.854.318 dan memangkas 13 kegiatan.

3. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan

INDEKS KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan menjadi pilar penting dalam bidang perekonomian. Oleh karena itu, ketahanan pangan harus dipermantap posisinya. Indikator keberhasilannya diukur dari Indeks ketahanan pangan. Pada tahun 2021, indeks ketahanan pangan ditargetkan sebesar 81,23. Target tersebut tercapai sebesar 78,13. Capaiannya 96,18 persen, dengan nilai mean 92,5 atau dengan kategori sangat berhasil

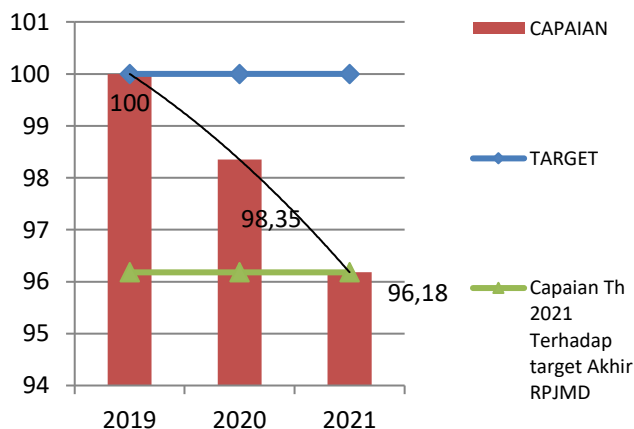
Indeks Ketahanan Pangan Dalam Tiga Tahun Terakhir



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2020

*Data 2021, data sementara

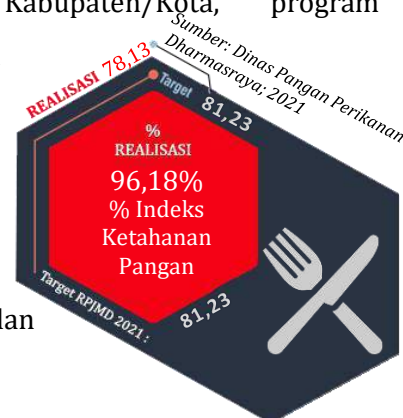
Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Pangan



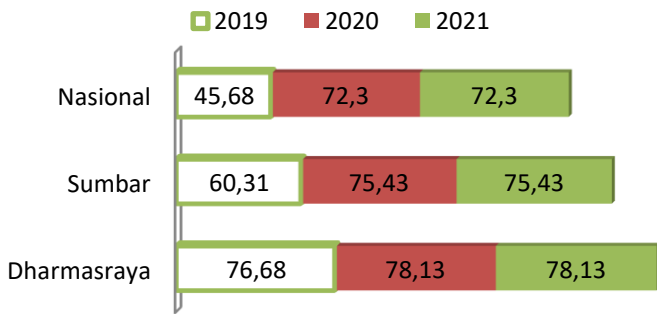
Indeks ketahanan pangan (IKP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.

Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Dharmasraya boleh dibilang dalam kondisi stabil. Bahkan capaiannya juga dalam katagori sangat berhasil. namun, indeks ketahanan pangan tahun 2021 belum dipublikasi oleh Badan Ketahanan Pangan, sehingga untuk capaian tahun 2021, masih memakai data tahun 2020.

Keberhasilan ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memang sangat komitmen untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Berbagai program digelar seperti penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota, program penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan



Capaian % Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Dharmasraya dibanding angka Provinsi dan Nasional



Sumber: Dinas Pangan Perikanan Kab. Dharmasraya; 2021
*data sementara

Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, capaian persentase Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Dharmasraya tertinggi melebihi pencapaian Provinsi dan Nasional, hal ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menjamin masyarakatnya memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan.

Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Meningkatnya Ketahanan Pangan

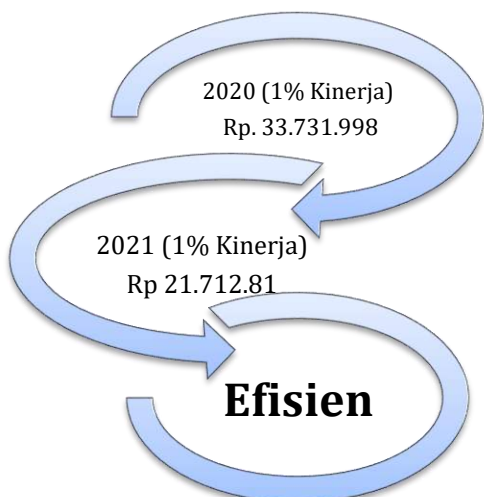
- Produksi Daging 6,699 ton
- Produksi Padi 42,426 ton
- Pola Pangan Harapan 94



Sumber: Dinas Pangan Perikanan dan Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya; 2021

- Ketersediaan Beras (Ton) 28,353 Ton
- Cadangan Pangan daerah (Ton) 27,89
- IK 89,89
IA 75,96
IP 70,95

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya Ketahanan Pangan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 7 Program dan 10 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.093.316.550



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan dinilai efektif dan efisien. Jika dibandingkan di tahun 2020, untuk mencapai 1% kinerja dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 33.731.998 dengan 17 Kegiatan, sedangkan ditahun 2021, untuk mencapai 1% kinerja, membutuhkan anggaran Rp. 21.712.812 dengan 10 Kegiatan, jadi dapat disimpulkan untuk mencapai 1% kinerja sasaran ke-3, Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan anggaran sebesar Rp. 12.019.186 dan memangkas 7 kegiatan

4. Sasaran Meningkatkan Kesetaraan Gender

Sasaran ini diukur dengan dua indikator, yaitu indek pembangunan gender (IPG) dan indek pemberdayaan gender (IDG). Untuk IPG ditargetkan 90,15 terealisasi 88,31 dengan persentase capaian 97,96 persen. Sedangkan untuk IDG target yang ditetapkan sebesar 50,73 terealisasi 50,87 dengan persentase capaian sebesar 100,27 persen. angka tersebut diperoleh **mean 92,5** atau masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

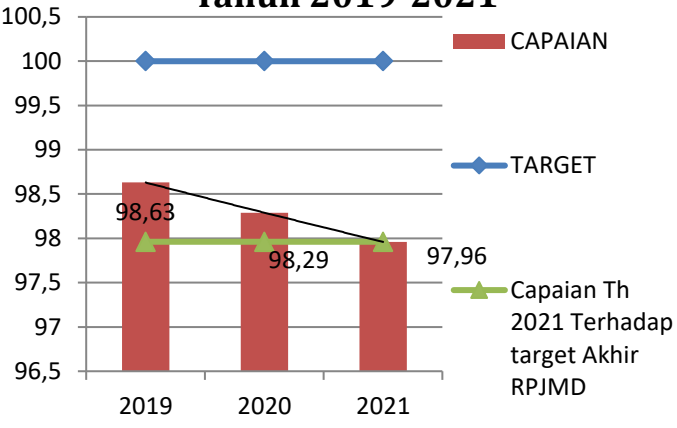


INDIKATOR INDEK PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

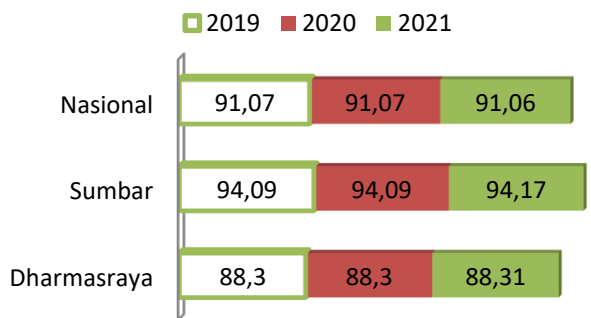
Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, serta meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan.

Indeks pembangunan gender Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 adalah 88,31. sedangkan target yang ditetapkan untuk IPG tahun 2021 adalah 90,15, sehingga persentase capaian IPG sebesar 97,96 persen. Berarti upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam membangun peranan kaum perempuan dan laki laki dalam menjalankan kehidupan di tengah masyarakat boleh dikatakan sangat berhasil. Namun dalam 3 (tiga) tahun terakhir, capaian kinerja IPG dibandingkan target yang ditetapkan mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh kesenjangan antara usia harapan hidup perempuan dengan laki-laki, angka partisipasi sekolah perempuan dan lelaki serta kesenjangan indeks distribusi pendapatan antara perempuan dan laki-laki di kehidupan masyarakat Kabupaten Dhasmasraya

Capaian Kinerja IPG Tahun 2019-2021



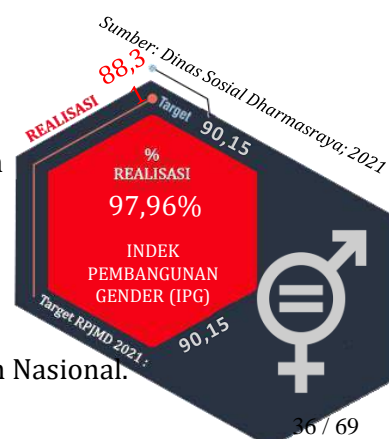
Capaian IPG Kabupaten Dharmasraya dibanding angka Provinsi dan Nasional



Sumber: Dinas Sosial Kab. Dharmasraya; 2021

Capaian IPG dalam tiga tahun terakhir yang cenderung naik.

Pada tahun 2019 IPG Kabupaten Dharmasraya 88,3 menjadi 88,31. meskipun mengalami kenaikan, namun IPG Kabupaten Dharmasraya masih berada di bawah IPG Provinsi Sumatera barat tahun 2021 sebesar dan juga IPG nasional yang mencapai 91,06. kondisi ini mewajibkan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk terus berinovasi agar IPG di masa datang bisa mengikuti angka Provinsi dan Nasional.



INDIKATOR INDEK PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)



IDG berfungsi untuk mengukur kesetaraan wanita dan pria dalam partisipasi politik dan

bidang ekonomi. Capaian nilai IDG di Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pencapaian tahun 2021 merupakan capaian kinerja tertinggi selama 3 tahun terakhir

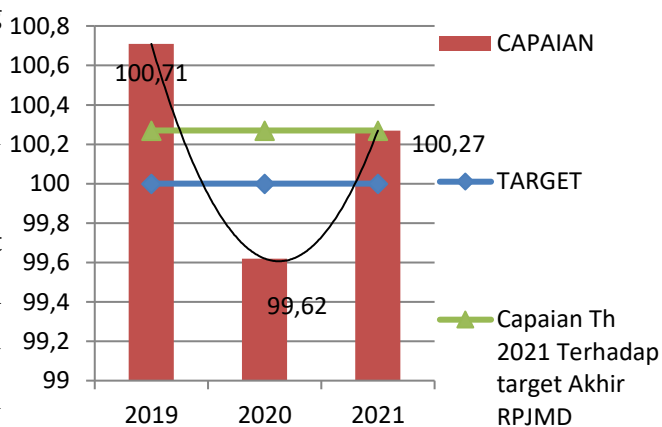
Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 sebesar 50,87 atau 100,27% dari target yang ditetapkan dengan kategori sangat berhasil.

Meskipun capaian IDG Kabupaten dinilai sangat berhasil, namun jika dibandingkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, capaian kinerja IDG dibandingkan target yang ditetapkan mengalami peningkatan serta penurunan, dan jika dibandingkan dengan angka IDG Provinsi Sumbar tahun 2021 sebesar 65,7 dan Nasional 75,57 maka capaian IDG Kabupaten Dharmasraya masih sangat jauh tertinggal.

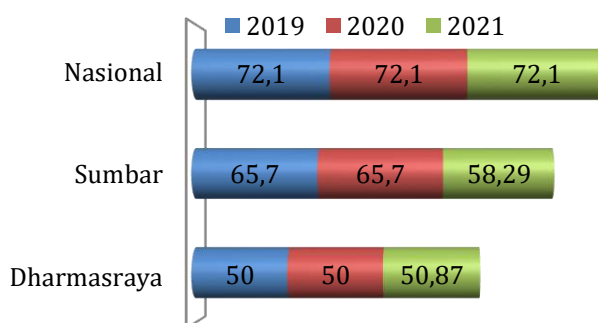
Ketertinggalan Kabupaten Dharmasraya di bandingkan Provinsi dengan Nasional salah satunya disebabkan oleh rendahnya keterlibatan perempuan didalam parlemen, dari 30 orang anggota parlemen di Kabupaten Dharmasraya, hanya 2 (dua) atau 6% anggota perempuan, hal ini sangat jauh dari standar minimal sebesar 30% kuota perempuan di parlemen.

Oleh karena itu diperlukan kerja keras, inovasi dan anggaran yang memadai untuk memberdayakan wanita di Kabupaten Dharmasraya agar beran aktif serta berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi maupun bidang politik, sehingga dapat meningkatkan IDG Kabupaten Dharmasraya di masa mendatang.

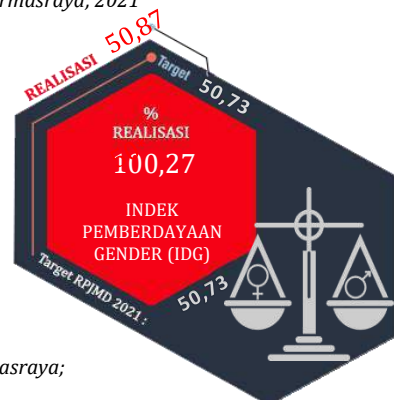
Capaian Kinerja IDG Tahun 2019-2021



Capaian IDG Dharmasraya dibanding angka Provinsi dan Nasional



Sumber: Dinsos P3APPKB Dharmasraya; 2021



Keterangan;
Sumber: Dinsos P3APPKB Dharmasraya;
2021

Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Terpenuhiya Hak Anak

Rata-rata Lama Sekolah
Pria : 9,1 Wanita : 8,89

IPM
Pria : 75,46 Wanita : 66,6

Usia Harapan Hidup
Pria : 71,1 Wanita : 74,9

Harapan Lama Sekolah
Pria : 13,69 Wanita : 14,41

PNS Dharmasraya
Pria : 35% Wanita : Rp.65%



Sumber: Badan Pusat Statistik; 2021

Keberhasilan meningkatnya kesetaraan gender didukung oleh beberapa program antara lain. Program keluarga berencana (KB) belakangan juga diarahkan agar bagaimana penguatan peranan perempuan dan laki-laki dapat lebih proporsional dalam merencanakan, mengelola dan mengendalikan kehidupan keluarga. Program peningkatan pendidikan politik masyarakat. Program ini dinilai cukup berhasil dengan tampilnya kaum perempuan di lembaga wakil rakyat. Program peningkatan peran serta kepemudaan juga mendorong peningkatan sasaran ini. Selain itu, untuk mencapai kinerja penyeteraan gender ini pelaksanaan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, seperti pemberdayaan organisasi wanita, PKK, dasawisma dan organisasi wanita lainnya juga dilaksanakan.

Jika disimpulkan, dalam mencapai sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan menetapkan 10 Program dan 10 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.075.543.100-. Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Terpenuhiya Hak Anak dinilai efektif dan efisien. Jika dibandingkan di tahun 2020, untuk mencapai 1% kinerja dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 15.490.383 dengan 15 Kegiatan, sedangkan ditahun 2021, untuk mencapai 1% kinerja, membutuhkan anggaran Rp. 10.531.897 dengan 10 Kegiatan, jadi dapat disimpulkan untuk mencapai 1% kinerja sasaran ke-4, Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan anggaran sebesar Rp. - 4.958.486 dan memangkas 5 kegiatan

2020 (1% Kinerja)
Rp. 15.490.383

2021 (1% Kinerja)
Rp 10.531.897

Efisien

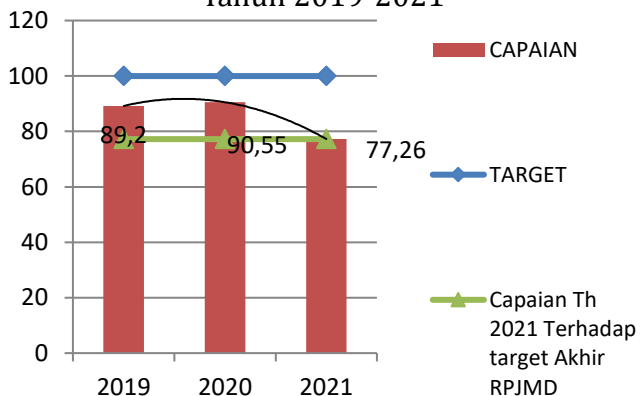
5. Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Jalan



Indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap

Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Jalan diukur dengan indikator Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap. Pada tahun 2021, proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap ditargetkan sebesar 63,33%. Target tersebut terealisasi 48,93% atau tercapai sebesar 77,26 persen. Dalam indikator tersebut diperoleh nilai mean **92,5** persen atau masuk katagori **berhasil**.

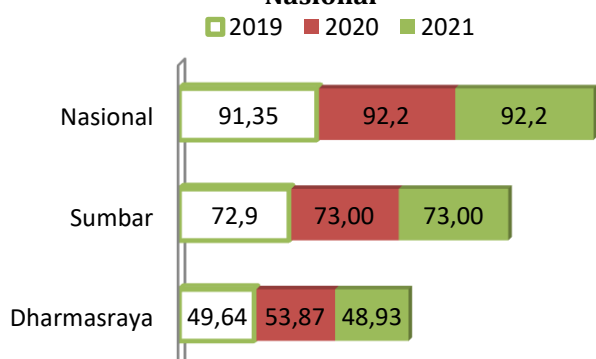
Capaian Kinerja Proporsi Jalan Mantap Tahun 2019-2021



meskipun belum mencapai target namun capaian indikator kinerja tersebut didorong oleh terlaksananya program dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan jalan dan jembatan, perbaikan dan perawatan jalan Kabupaten dan juga keberhasilan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam mendorong agar nagari ikut melakukan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah masing masing. Dengan demikian, akses jalan dan proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Dharmasraya makin baik.

Jika dibandingkan dari target yang ditetapkan, capaian kinerja proporsi jalan mantap meningkat di tahun 2020 namun menurun kembali di tahun 2021, faktor utama penyebab penurunan ini adalah keterbatasan anggaran yang mampu dialokasikan Pemerintah Kabupaten untuk pembangunan serta perbaikan jalan.

Capaian Proporsi Jalan Kondisi Mantap Kabupaten Dharmasraya dibanding angka Provinsi dan Nasional



Proporsi Jalan dengan Kondisi mantap (>40km/Jam) di Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 belum mencapai 50%, sedangkan jalan Provinsi dalam kondisi mantap ditahun yang sama telah mencapai 73% dan jalan Nasional dalam kondisi mantap sebesar 92,2%,



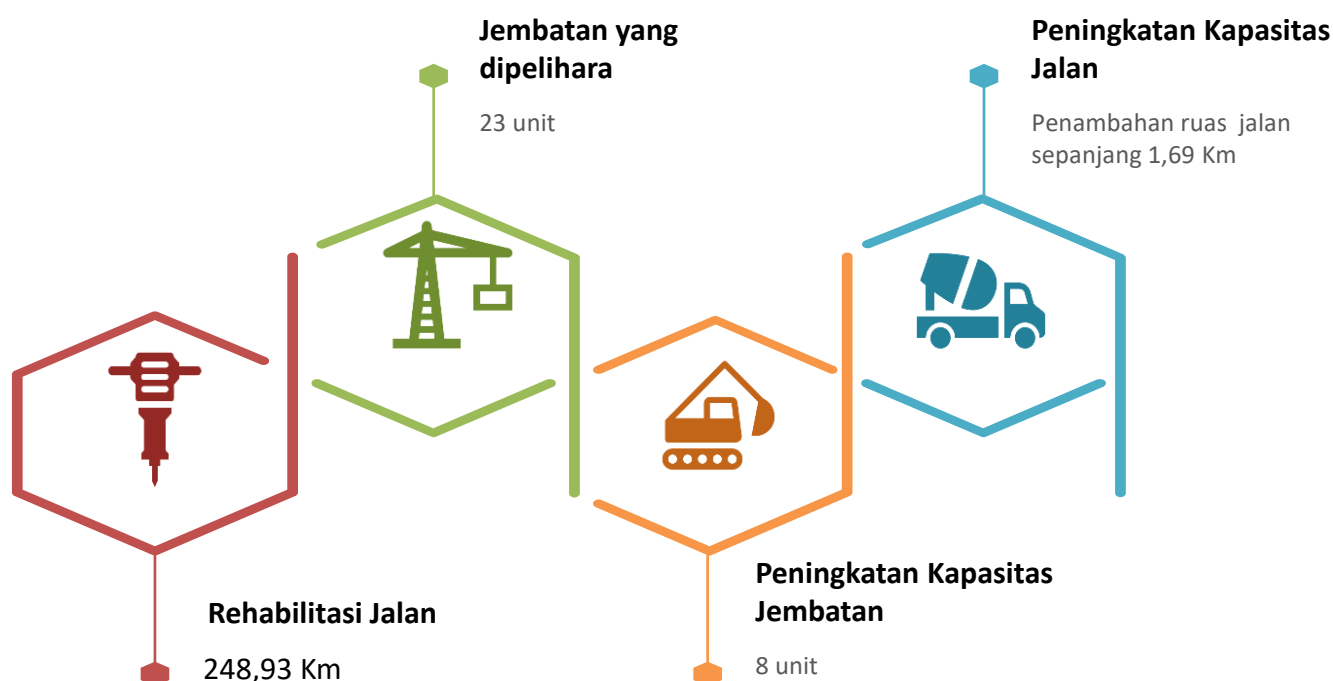
Sumber: Dinas PUPR Kab. Dharmasraya; 2021

Panjang jalan dalam kondisi rusak sedang, yang direhabilitasi di tahun 2021 adalah sepanjang 248.93 km di bagi panjang jalan Kabupaten seluruhnya 1042.85 km,

dengan melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (DAK Fisik) Ruas : 00008560 – Simp. 14 – Batu Rijal 8,045 km
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket I (Kecamatan Sembilan Koto,Pulau Punjung & Sitiung) 99 Km
3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket II (Kecamatan Koto Baru, Koto Salak, Timpeh, Padang Laweh dan Kecamatan Tiumang) 74,00 Km
4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket III (Kecamatan Koto Besar, Sungai Rumbai dan Kecamatan Asam Jujuhan) 75,93 km

Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Jalan



Sumber: Dinas PUPR Kab. Dharmasraya; 2021

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 10 Program dan 16 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 77.686.150.148



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan dinilai kurang efektif dan efisien. Jika dibandingkan di tahun 2020, untuk mencapai 1% kinerja dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 458.771.183 dengan 14 Kegiatan, sedangkan ditahun 2021, untuk mencapai 1% kinerja, membutuhkan anggaran Rp. 918.724.686 dengan 16 Kegiatan. Hal ini dikarenakan banyaknya kerusakan jalan di tahun 2021, sehingga, masih banyak jalan di Kabupaten Dharmasraya yang belum memenuhi kriteria mantap

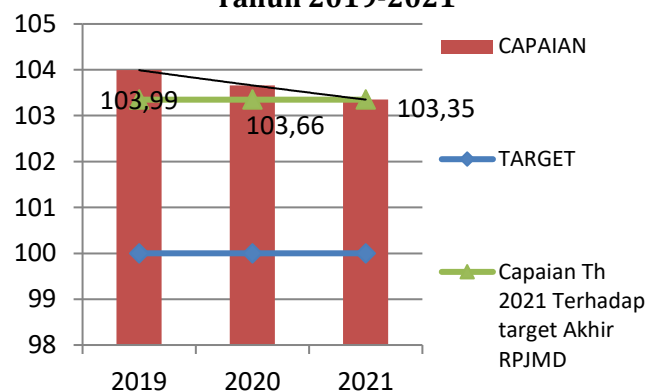
6. Sasaran Meningkatkan Kualitas Perumahan

INDIKATOR RASIO RUMAH LAYAK HUNI

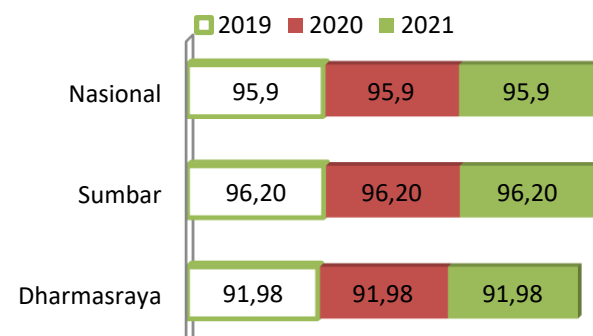
Pemerintahan yang baik adalah ketika Pemerintahan dapat menjamin ketersediaan kebutuhan primer masyarakatnya salah satunya adalah kebutuhan papan, hal ini yang mendasari kebutuhan papan menjadi bagian dari salah satu sasaran kinerja daerah yang harus dipenuhi.

Sasaran Meningkatkan Kualitas Perumahan diukur dengan indikator rasio rumah layak huni. Pada tahun 2021, rasio rumah layak huni ditargetkan sebesar 89 persen. Target tersebut terealisasi 91,98 persen dengan capaian sebesar 103,35 persen. Dalam sasaran tersebut diperoleh nilai mean **92,5** atau masuk katagori **sangat berhasil**

Capaian Kinerja Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2019-2021



Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Dharmasraya dibanding Provinsi dan Nasional



Sumber: Kementerian PUPR; 2021

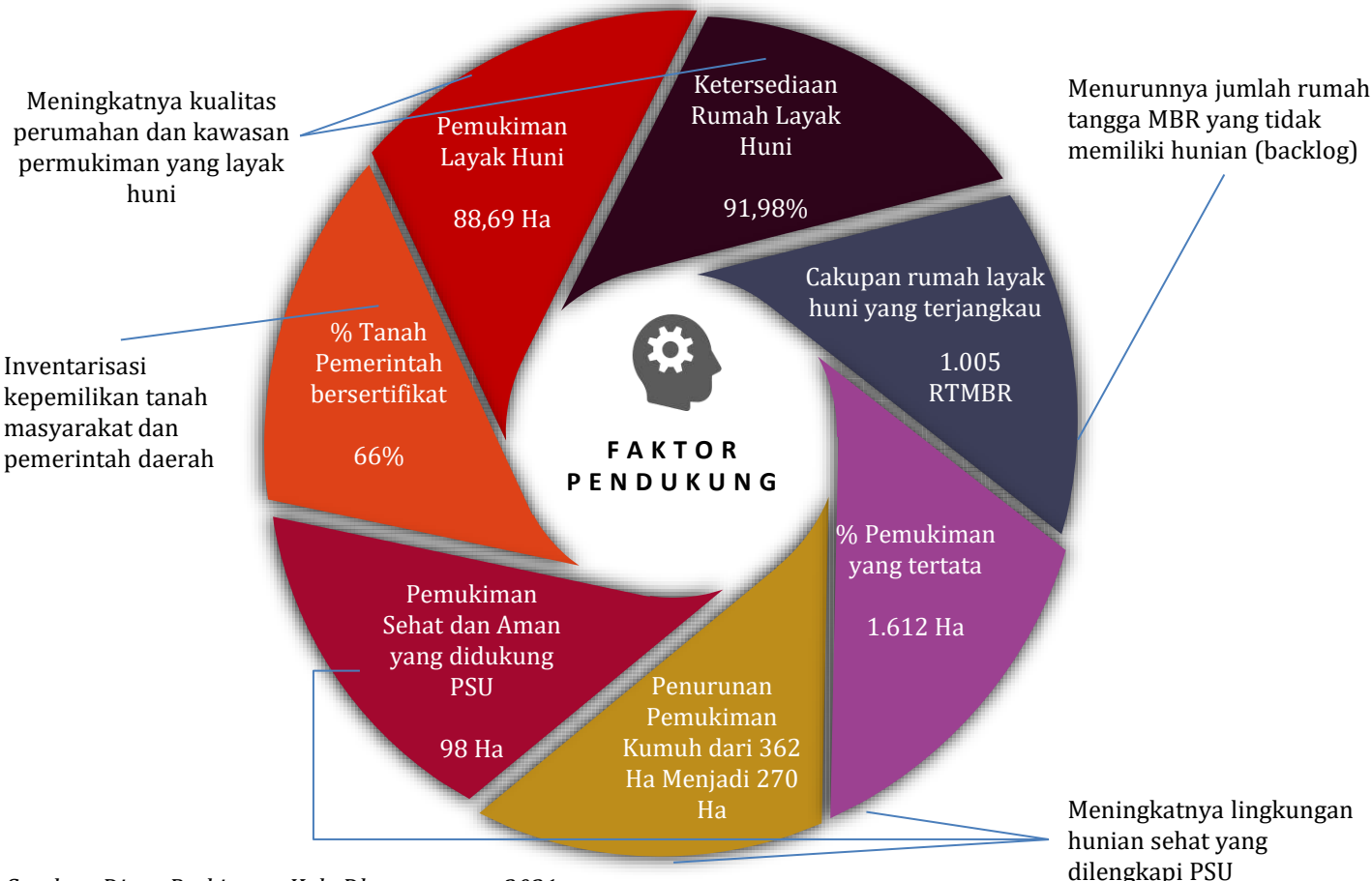
Rasio rumah layak huni di Kabupaten Dharmasraya mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 hingga 2021 rasio rumah layak huni sebanyak 91,98% . Namun dalam hal pencapaian, pencapaian tahun 2021 mengalami penurunan dari 103,99% menjadi 103,35%, hal ini dikarenakan Daerah lebih memfokuskan anggaran kepada penanggulangan dampak wabah *Covid-19*.

Walaupun capaian rasio rumah layak huni di Kabupaten Dharmasraya telah melebihi target yang ditetapkan, namun, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional, Kabupaten Dharmasraya masih dibawah rasio rumah layak huni di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, tahun 2021 rasio rumah layak huni sebesar 96,2

Sedangkan rasio rumah layak huni Nasional sebesar 95,9.

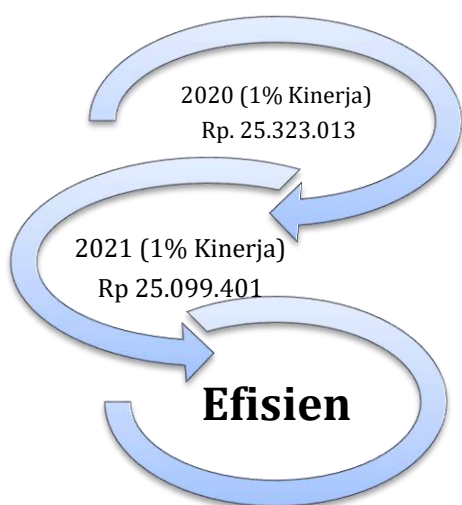


Besarnya capaian rasio rumah layak huni itu didukung oleh adanya pemberian bantuan untuk rehab rumah tidak layak huni. Selain itu pemerintah juga mendorong masyarakat untuk secara mandiri membenahi rumahnya agar masuk dalam standar rumah layak huni. Melalui komunitas perumahan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengembangkan rumah layak huni. Penataan kawasan perumahan juga mendorong adanya kesadaran masyarakat untuk membangun dan merehabilitasi rumah mereka sehingga bisa menjadi rumah layak huni.



Sumber: Dinas Perkimtan Kab. Dharmasraya; 2021
*angka sementara

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas perumahan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 6 Program dan 7 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.943.746.466 ,-

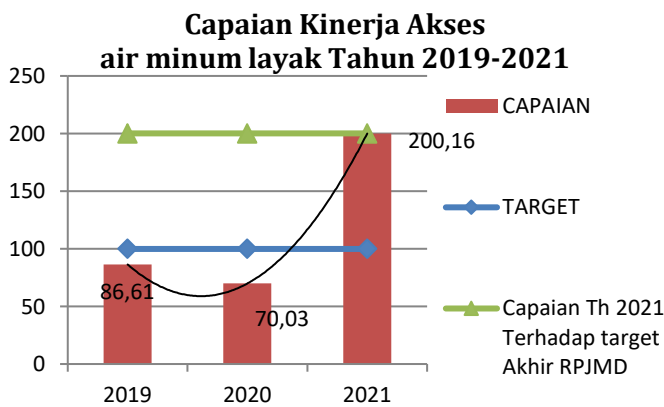


Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perumahan dinilai efektif dan efisien. Jika dibandingkan di tahun 2020, untuk mencapai 1% kinerja dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 25.323.013 dengan 10 Kegiatan, sedangkan ditahun 2021, untuk mencapai 1% kinerja, membutuhkan anggaran Rp. 25.099.401 dengan 7 Kegiatan, jadi dapat disimpulkan untuk mencapai 1% kinerja sasaran ke-6, Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan anggaran sebesar Rp. 223.612 dan memangkas 3 kegiatan

7. Meningkatnya Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak

Untuk mengetahui sejauh mana sasaran ini bisa dicapai, maka ditetapkan indikator persentase akses air minum yang layak dan persentase sanitasi yang layak.. Dari dua indikator diatas didapatkan nilai mean 92,5 atau masuk dalam kategori sangat berhasil

Indikator Akses Air Minum Layak



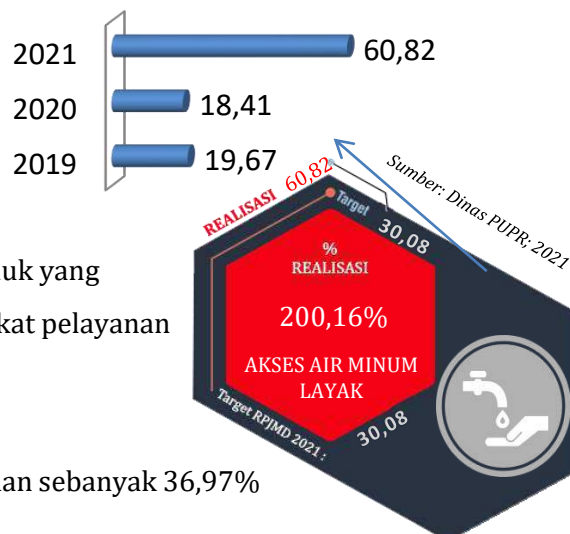
Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah.

Akses air minum layak tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini menggambarkan kesuksesan Pemerintah dalam menjamin masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap air minum yang layak,

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan target akses air minum layak sebesar 30,08%. Target tersebut terealisasi sebesar 60,82%, dengan capaian 200,16 %.

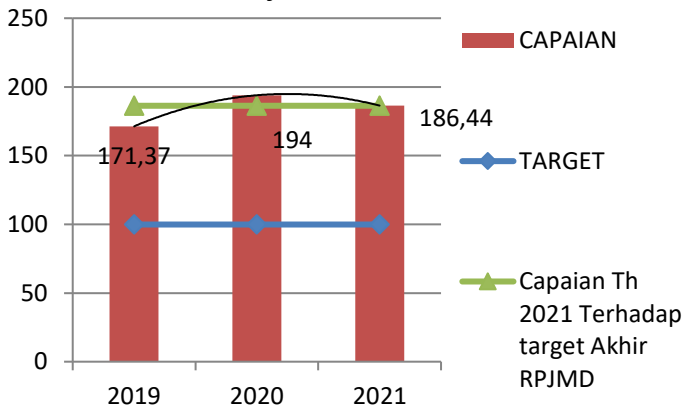
Untuk akses air minum layak ini dihitung hanya dari pelayanan system perpipaan saja sesuai dengan kegiatan yang ada pada program pengembangan air minum dan air limbah, adapun tingkat persentase pelayanan air minum Perpipaan adalah sebagai berikut :

1. SPAM yang dikelola oleh UPT SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari Sambungan Rumah (SR) jumlah penduduk terlayani sebanyak 7.525,- jiwa dengan persentase tingkat pelayanan capaiannya sebesar 3,07 %
2. SPAM Pamsimas yang dikelola oleh masyarakat, jumlah penduduk yang terlayani adalah sebanyak 32.452,- jiwa dengan persentase tingkat pelayanan dengan capaiannya sebesar 13,24 %
3. Masyarakat terlayani jaringan perpipaan sebanyak 23,85%
4. Masyarakat terlayani sumber air minum bukan jaringan perpipaan sebanyak 36,97%



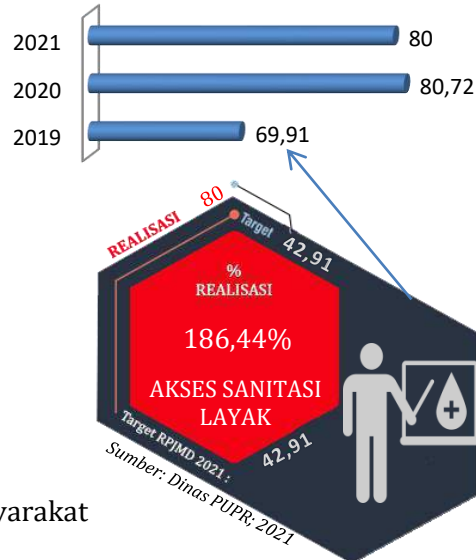
Indikator Akses terhadap Sanitasi layak

Capaian Kinerja Akses terhadap Sanitasi layak Tahun 2019-2021

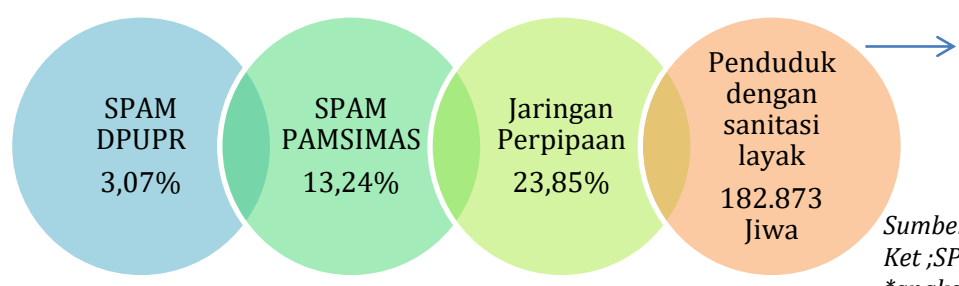


Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. akses sanitasi layak yang ditargetkan sebesar 42,91 persen dan realisasi 80 persen dengan capaian 186,4 persen. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020, namun jika dibandingkan dengan capaian di akhir RPJMD, Kabupaten Dharmasraya telah menuntaskan masalah akses sanitasi yang layak di masyarakat

Pada indikator Sasaran Akses Sanitasi Layak dengan target 42,9% dengan realisasi 80% dan capaian 186,44 %. realisasi ini di dapat dari jumlah penduduk yang terlayani (jiwa) 182.873,- dibagi jumlah penduduk 228.591 jiwa. sanitasi yang layak di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah daerah dan masyarakat.

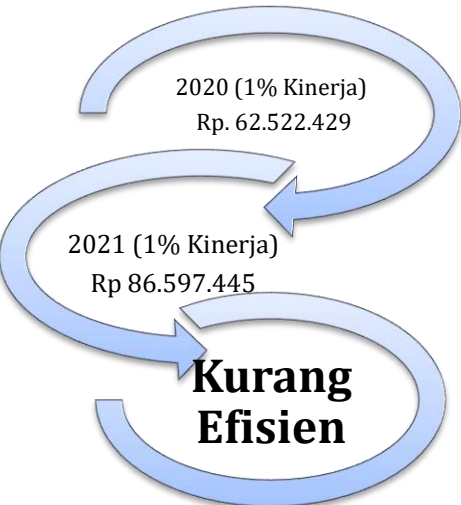


Keberhasilan capaian meningkatnya akses dan sanitasi yang layak didorong oleh berbagai program, antara lain adanya program SPAM. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mendorong kelompok masyarakat untuk membangun sistem pengelolaan air bersih berbasis masyarakat (Pamsimas). Inventarisasi sumber air baku juga terus dilakukan. Pengalokasian anggaran yang proporsional terhadap pengembangan Pamsimas, telah mendorong naiknya akses masyarakat untuk mendapatkan akses sanitasi yang layak.



Faktor Pendukung Pencapaian

Sumber: Dinas PUPR Dharmasraya:2021
Ket ;SPAM (Sumber Penyediaan Air Minum)
*angka sementara



Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 5 Program dan 9 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.155.643.450 ,- untuk mencapai sasaran ini.

Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran ini dinilai efektif namun belum efisien. Jika dibandingkan di tahun 2020, untuk mencapai 1% kinerja dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 62.522.429 dengan 10 Kegiatan, sedangkan ditahun 2021, untuk mencapai 1% kinerja, membutuhkan anggaran Rp. 86.597.445 dengan 9 Kegiatan, sehingga dapat disimpulkan untuk mencapai sasaran ini belum bisa mengefisienkan anggaran namun telah memangkas 1 kegiatan

8. Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB



Indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Untuk mengetahui sejauh mana pengembangan sektor pertanian, maka ditetapkan indikator persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Pada tahun 2021, peranan sektor pertanian terhadap PDRB ditargetkan sebesar 29 persen. Realisasi yang dapat diwujudkan sebesar 27 persen. Ini berarti tingkat capainnya 106,9 persen atau dalam kategori **sangat berhasil** dengan nilai mean **92,5**.

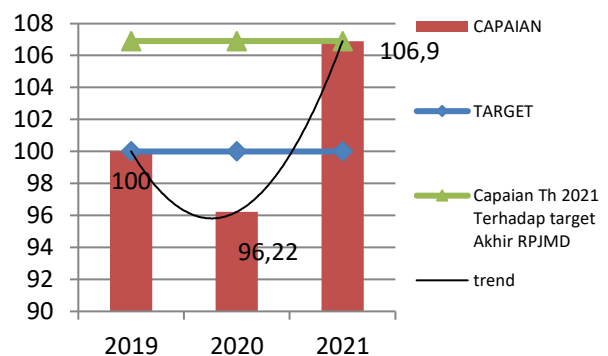
Capaian PDRB terhadap sektor pertanian telah sangat berhasil, capaian indikator tersebut di tahun 2021 telah mencapai 106,9%, capaian ini hampir mencapai target yang ditetapkan di akhir tahun RPJMD, hal ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Dharmasraya telah memfokuskan pencapaian sektor pertanian terhadap perkembangan PDRB.

Meskipun Kabupaten Dharmasraya sukses meningkatkan peranan sektor pertanian terhadap PDRB, namun bila dibanding dengan indikator yang sama untuk rata-rata Sumatera Barat (21,83 persen) dan nasional (12,37 persen), ternyata angkanya masih jauh lebih tinggi.

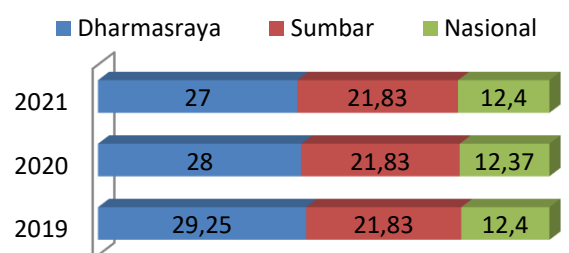
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan peranan sektor pertanian terhadap PDRB didukung oleh berbagai program.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyelenggarakan intensifikasi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam usaha budidaya tanaman pangan, peternakan, perikanan dan juga perkebunan. Selain melaksanakan intensifikasi, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga melaksanakan ekstensifikasi. Dengan demikian produksi pertanian bisa meningkat dan juga pendapatan petani meningkat.

Capaian Kinerja % kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2019-2021



Perbandingan persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

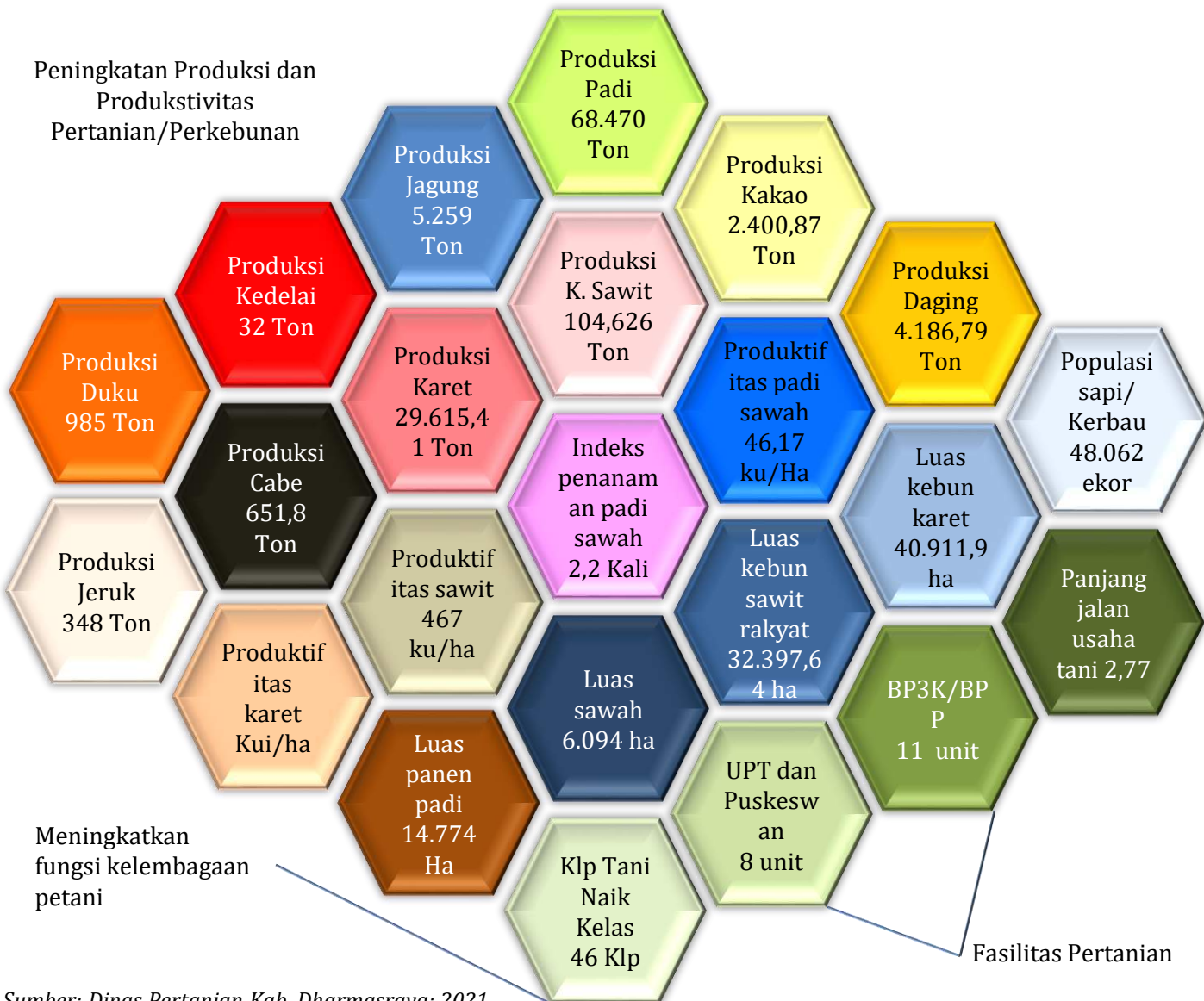


Sumber: Badan Pusat Statistik; 2021



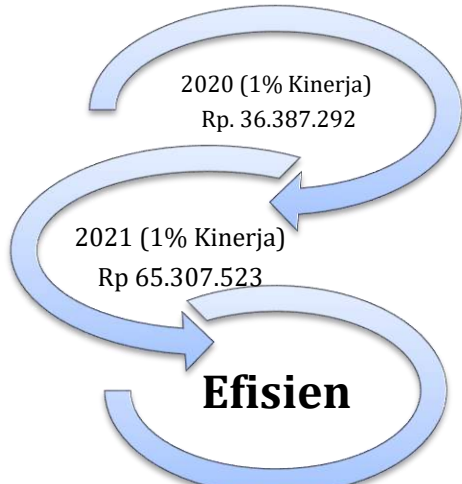
Sumber: Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya; 2021

Di luar itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga membangun jaringan irigasi, mendorong pemberian modal oleh perbankan, membangun pasar dan sarana perhubungan serta mengintroduksi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil. Upaya ini juga mendorong makin besarnya nilai tukar petani di Kabupaten Dharmasraya.



Sumber: Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya; 2021

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 6 Program dan 14 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.060.888.867,-



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB dinilai efektif namun belum efisien. Jika dibandingkan di tahun 2020, untuk mencapai 1% kinerja dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 36.387.292, sedangkan ditahun 2021, untuk mencapai 1% kinerja, membutuhkan anggaran Rp. 65.307.523, sehingga dapat disimpulkan untuk mencapai sasaran ini belum bisa mengefisienkan anggaran namun telah mengefektifkan kegiatan di tahun 2021

9. Sasaran Meningkatkan Daya Saing Dunia Usaha dan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

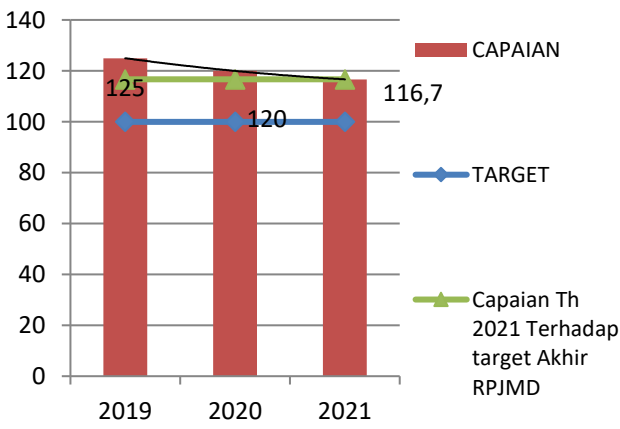


Untuk mengukur sasaran meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat, Kabupaten Dharmasraya menetapkan 4 indikator antara lain, 1. jumlah koperasi sehat, 2. pelaku usaha mikro naik kelas, 3. persentase IKM dengan peningkatan Omset, 4. Persentase pasar dalam kondisi baik. Rata-rata capaian sasaran ini sebesar 116,81 dengan kategori **Sangat Berhasil** dengan nilai **Mean 92,5**

1. Jumlah Koperasi Sehat

Untuk indikator jumlah koperasi sehat, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menargetkan 30 unit pada tahun 2021. target tersebut bisa dicapai dengan sangat baik sebesar 35 unit. Itu berarti capaian indikator tersebut sebesar 116,67 persen. Pencapaian jumlah koperasi sehat di Kabupaten Dharmasraya sudah sangat berhasil, dan sudah mencapai target RPJMD tahun 2021.

Capaian Jumlah Koperasi Sehat Tahun 2019-2021



Untuk meningkatkan kualitas manajemen koperasi, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan melaksanakan pembinaan terhadap koperasi dan pelatihan pengelolaan simpan pinjam koperasi.

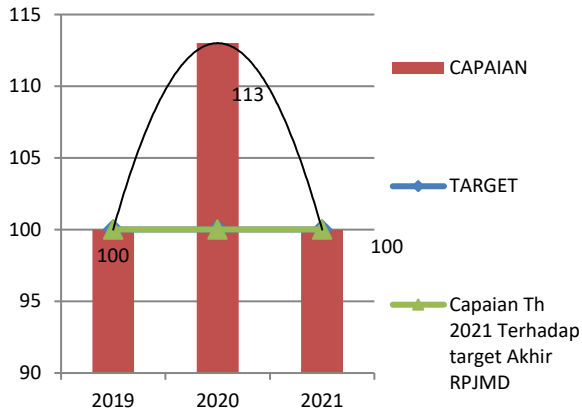
Keberhasilan capaian indikator tersebut itu didukung oleh langkah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam pembinaan koperasi. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengintensifkan pembinaan koperasi, terutama yang menyangkut dengan organisasi, keanggotaan dan juga unit usaha yang dilakukan oleh koperasi sehingga koperasi sangat berperan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Setiap koperasi didorong untuk melaksanakan rapat anggota tahunan tepat waktu dan mematuhi anggaran dasar yang ada.



2. Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas

Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas adalah jumlah pelaku usaha mikro yang telah meningkat dan memenuhi kriteria skala usaha kecil. Pada tahun 2021, pengusaha mikro yang naik kelas ditargetkan 40 unit. Target tersebut bisa dicapai dengan sangat berhasil. Bahkan realisasinya melampaui angka yang ditargetkan, yaitu 40 unit atau 100% dengan kategori sangat berhasil

Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas Tahun 2019-2021

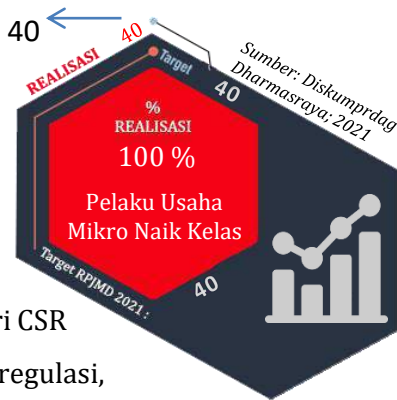


Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga mendorong terwujudnya

kemitraan antara pengusaha mikro dengan pengusaha kecil menengah, terutama dalam pemasaran produksi, mendorong pemanfaatan modal perbankan dan kontribusi koperasi dalam permodalan, selain itu permodalan dari CSR perusahaan perusahaan besar yang ada di daerah. Langkah lainnya menyangkut regulasi, dimana perizinan dan keamanan dipermudah dan distabilkan. Oleh karena itu, dalam tiga tahun terakhir, kenaikan kelas bagi usaha mikro cenderung mengalami peningkatan.

Pelaku usaha mikro naik kelas ini didorong oleh keberhasilan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam membangun iklim kondusif bagi berkembangnya dunia usaha mikro, antara lain dengan menciptakan peluang produk bagi usaha mikro, terutama di bidang produk makanan lokal. Pelaku usaha mikro juga diberikan pelatihan teknis terkait dengan pembuatan produk, disain, pemasaran dan manajemen

keuangan.



3. persentase IKM Dengan Peningkatan Omzet

Omzet industri kecil dan menengah (IKM) yang mengalami peningkatan di tahun 2021 ditargetkan sebesar 6,5 persen. Namun kenyataannya target tersebut bisa dicapai hingga 9,26 persen. Ini merupakan capaian yang sangat berhasil, sehingga pada akhir 2021 IKM yang mengalami peningkatan Omzet mencapai 9,26 persen. Dan telah mencapai target tahun akhir RPJMD.

Peningkatan omzet IKM ini Didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya seperti promosi produk-produk lokal di berbagai daerah.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selalu mengikut-

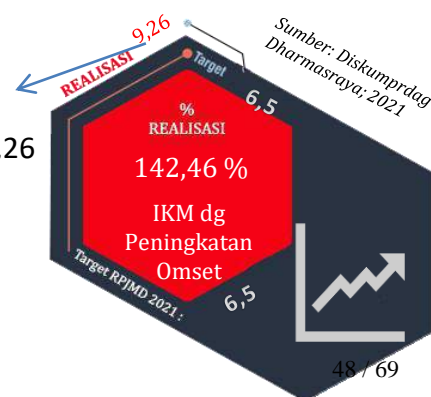
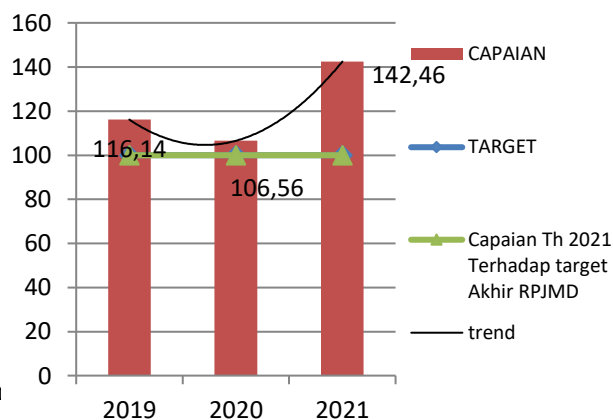
sertakan pelaku IKM untuk mengikuti pameran

di berbagai daerah. dengan demikian ada

peningkatan penjualan yang mengakibatkan

sejumlah IKM mengalami peningkatan Omzet.

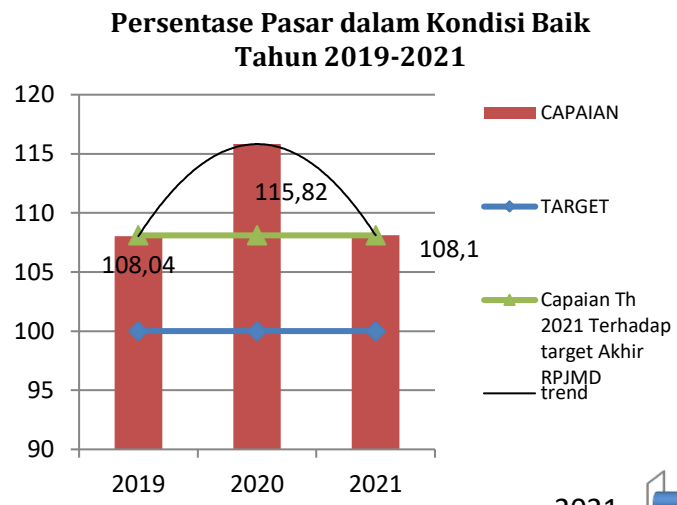
Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet Tahun 2019-2021



Selain mendorong peningkatan pemasaran, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga membantu peningkatan efisiensi biaya produksi, sekaligus meningkatkan produksi dengan cara menyediakan bahan baku yang lebih murah melalui kerjasama dengan koperasi, mendorong agar seluruh ASN memakai produk batik yang diproduksi oleh UKM di Kabupaten Dharmasraya

4. Persentase Pasar dalam Kondisi Baik

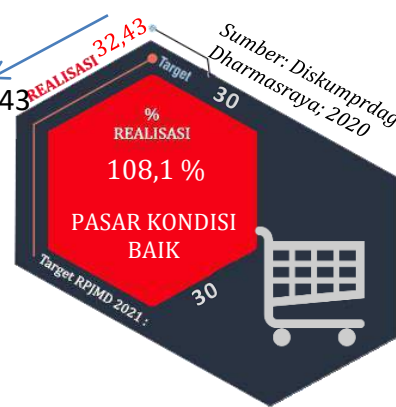
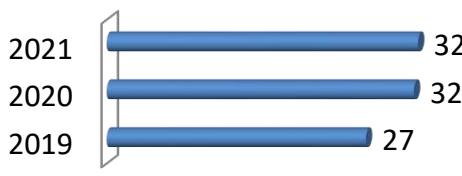
Pembangunan pasar, baik pasar nagari maupun pasar Kabupaten terus diupayakan agar persentase pasar dalam kondisi baik terus meningkat. Tahun 2021, target persentase pasar dalam kondisi baik sebesar 30%, terealisasi 32,43% dengan capaian 108,1%.



persentase pasar rakyat dalam kondisi baik tahun 2021 dapat dicapai dengan baik, target yang ditetapkan untuk persentase pasar dalam kondisi baik adalah 30%, hal ini dapat direalisasikan sebesar 32,43% dengan persentase capaian 108,1. diharapkan tahun selanjutnya, seluruh pasar di Kabupaten Dharmasraya dalam kondisi baik.

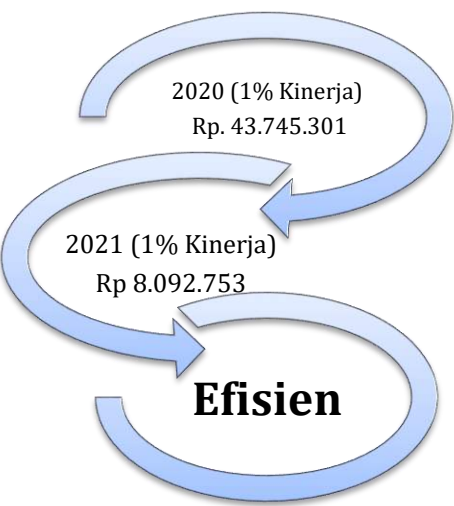
Peningkatan persentase pasar dalam kondisi baik ini didukung oleh pelaksanaan berbagai program.

Beberapa program di antaranya adalah pembangunan los dan kios di pasar tradisional. Selain membangun kios dan los, juga memperbaiki drainase, mengelola persampahan dan menata perpustakaan di area pasar.



Faktor Pendukung Pencapaian

Sumber: Diskumprdag Dharmasraya; 2021



Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 9 Program dan 11 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.040.967.625 ,- untuk mencapai sasaran ini.

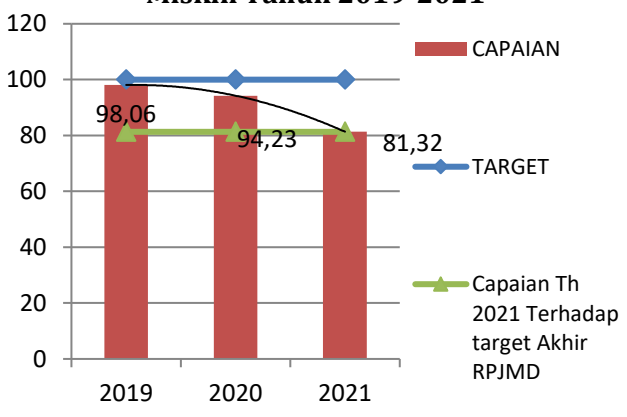
Akuntabilitas keuangan terhadap capaian ini dinilai efektif dan efisien. Jika dibandingkan di tahun 2020, untuk mencapai 1% kinerja dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 43.745.301 dengan 11 Kegiatan, sedangkan ditahun 2021, untuk mencapai 1% kinerja, membutuhkan anggaran Rp. 8.092.753 dengan 11 Kegiatan, jadi dapat disimpulkan untuk mencapai 1% kinerja sasaran ke-9, Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan anggaran sebesar Rp. -35.652.548

10.Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan

INDIKATOR PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi bagian penting dari sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator persentase penduduk miskin. Pada tahun 2021, target persentase penduduk miskin adalah 5,62 persen. target tersebut tercapai dengan sangat baik, yaitu 6,67 persen. Capaian tersebut 81,32 persen atau berketagori berhasil dengan nilai mean 77,5

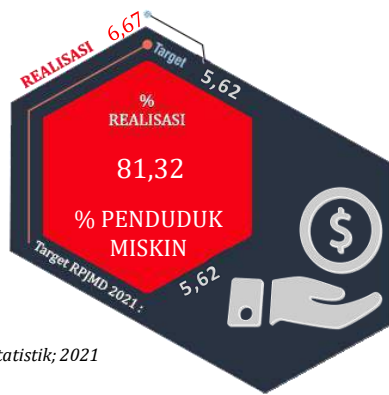
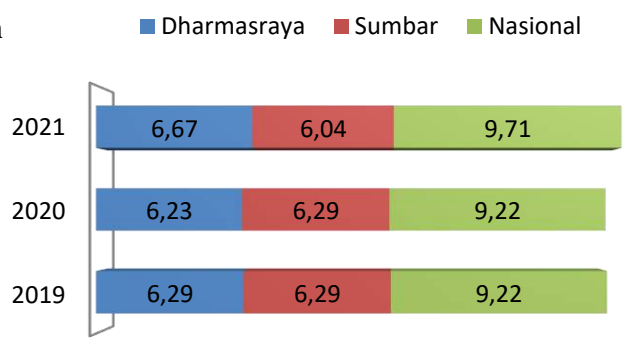
Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2021



Capaian Kinerja menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya Selama tiga Tahun berturut-turut tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya selalu mengalami penurunan, rata-rata penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,26 point, pada tahun 2021 capaian penurunan penduduk miskin sebesar 81,32 %, jika dibanding dengan capaian RPJMD, capaian penduduk miskin baru mencapai 81,32%. Hal ini dikarenakan dampak Covid-19 sehingga pencapaian sasaran ini belum bisa meningkat dari tahun sebelumnya.

jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya dalam tiga tahun terakhir berada di bawah kemiskinan Nasional, pada tahun 2021 Tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,04 % , dan jauh lebih

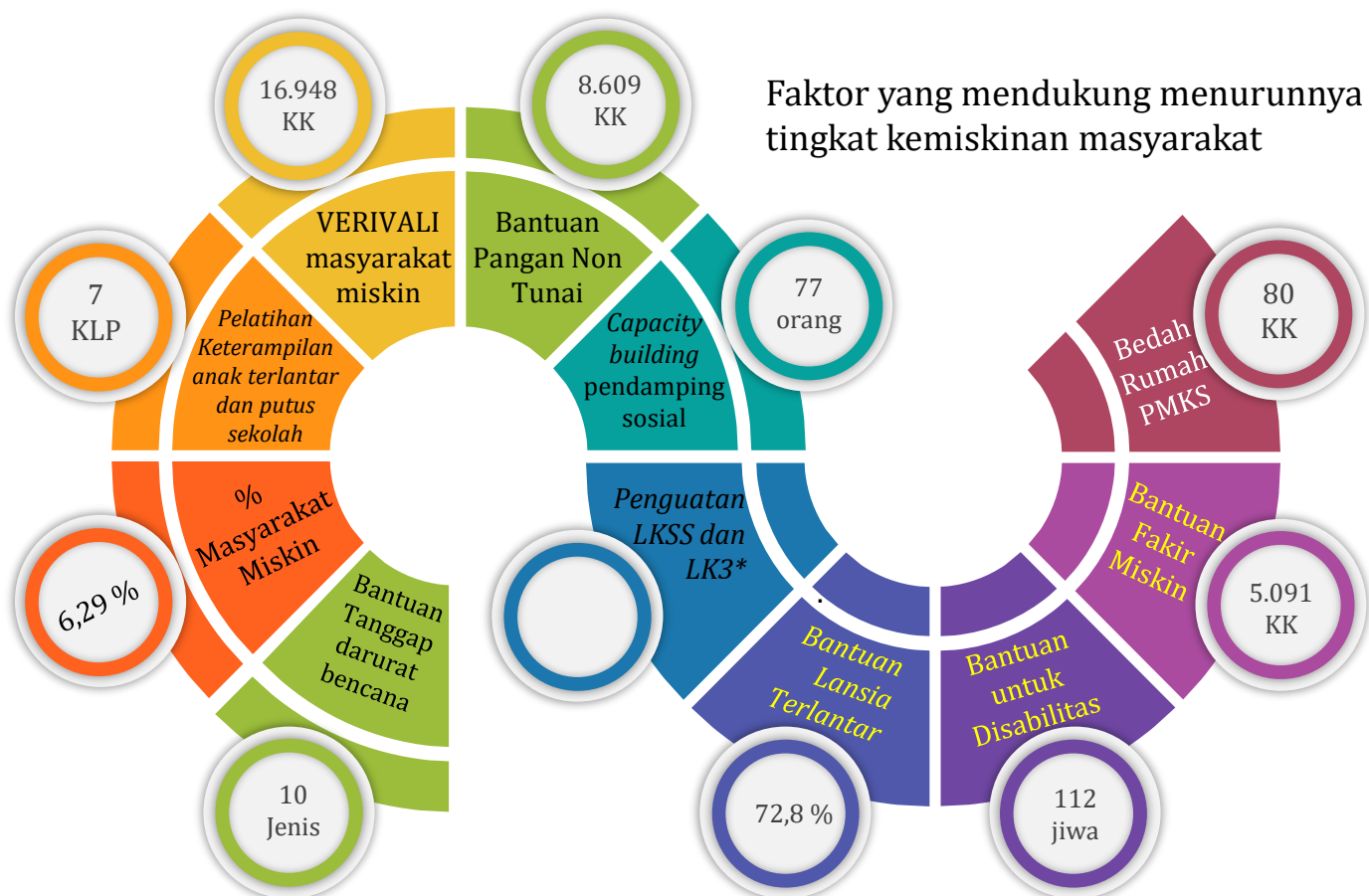
rendah dibanding penduduk miskin nasional 9,71 persen. Kontribusi pengentasan kemiskinan Kabupaten Dharmasraya cukup besar untuk provinsi dan nasional dalam pengentasan kemiskinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

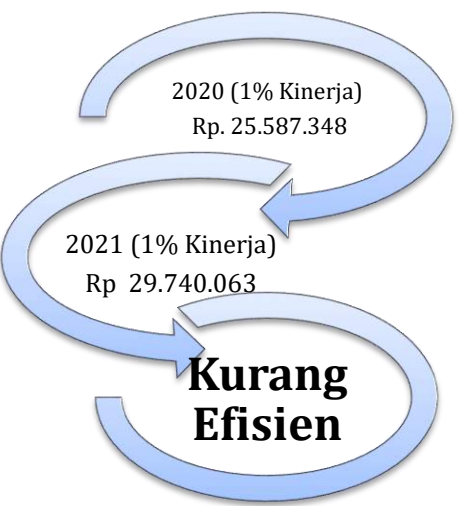
Keberhasilan menurunkan angka kemiskinan itu dipicu oleh keberhasilan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, antara lain program pengentasan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya membentuk tim penanggulangan tingkat kemiskinan yang bekerja mengkoordinasikan berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh semua stakeholders

Selain itu, program sektoral terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat juga cukup berhasil, di antaranya intensifikasi pertanian, pengembangan usaha kecil dan menengah dan juga membaiknya iklim usaha di Kabupaten Dharmasraya. Ini secara tidak langsung telah menambah pendapatan masyarakat, termasuk masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan



Sumber: Dinsos P3APPKB Dharmasraya; 2021

Keberhasilan pencapaian sasaran menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 11 Program dan 18 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.476.408.720,-



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran menurunnya tingkat kemiskinan dinilai kurang efisien dibandingkan tahun 2020. karena anggaran yang dialokasikan untuk mencapai 1% pencapaian kinerja lebih besar dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan keadaan Kabupaten yang memfokuskan anggaran untuk menanggulangi dampak pandemic Covid-19, selain itu, Kabupaten Dharmasraya masih dalam masa pemulihan pasca pandemic baik bidang Kesehatan maupun sector perekonomian.



11. Meningkatnya pemanfaatan, pengelolaan, serta pengendalian fungsi-fungsi lingkungan hidup

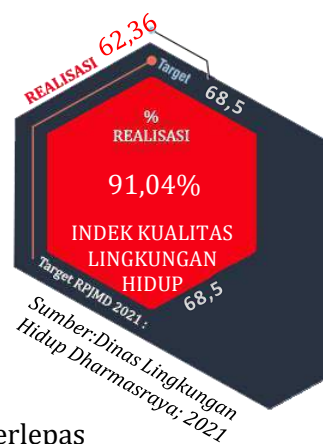
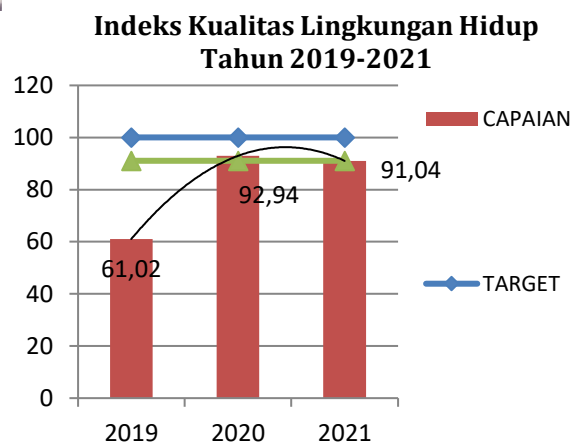
1. Indikator Indek Kualitas Lingkungan Hidup

Pada tahun 2021, indeks kualitas lingkungan di Kabupaten Dharmasraya ditargetkan 68,5 indek. dari target tersebut dapat direalisasi sebesar atau dengan capaian 62,36 indek, dengan capaian 91,04% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Keberhasilan ini didukung oleh adanya upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk menjamin indeks kualitas udara, indeks kualitas air dan tutupan lahan dalam kondisi yang baik, selain itu, Pemerintah Kabupaten juga menjamin dalam penanggulangan kebakaran hutan dan juga mengendalikan sumber-sumber polusi udara. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga berhasil dalam kegiatan menanam pohon.

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya pemanfaatan, pengelolaan, serta pengendalian fungsi-fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan 11 Program dan 17 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.540.491.601,-

Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya pemanfaatan, pengelolaan, serta pengendalian fungsi-fungsi lingkungan hidup dinilai kurang efisien. karena untuk mendapatkan 1% pencapaian sasaran ditahun 2020 Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 34.920.668, lebih rendah dibandingkan tahun 2021 dimana realisasi anggaran untuk mendapatkan 1% capaian sebesar Rp. 30.731.503 artinya di tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya lebih mengefisienkan anggaran



12. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Pembangunan



Sasaran efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu persentase capaian RPJMD (IKU Daerah) dengan capaian dan OPINI BPK terhadap laporan keuangan dengan capaian 100%. Dari ke 2 (dua) indikator ini, didapatkan rata-rata capaian sasaran 119,47 dengan kategori **Sangat Berhasil** dan Nilai **Mean 92,5**

1. Persentase Capaian RPJMD (IKU Daerah)

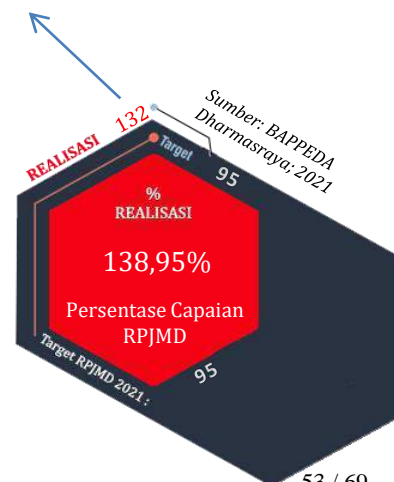
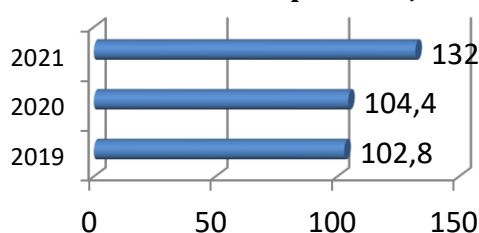
Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan menjadi salah satu bagian yang ingin diwujudkan. Salah satu ukurannya adalah persentase capaian RPJMD. Pada tahun 2021, persentase capaian RPJMD sebesar 132 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 95 persen dengan capaian sebesar 138,95%.

Pengukuran capaian RPJMD dihitung berdasarkan rata-rata capaian dari seluruh sasaran indikator yang dicapai dalam indikator kinerja utama daerah, dari 15 sasaran dan 25 indikator yang ditetapkan, didapatkan rata-rata capaian yang didapatkan sebesar 138,95%

Capaian tersebut itu dinilai sangat berhasil dan terus mengalami peningkatan dalam hal poin yang didapat dalam tiga tahun terakhir. Prestasi tersebut didukung dengan adanya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan dan juga komitmen pimpinan daerah dan kepala OPD yang tinggi untuk mewujudkan target dan indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Mantapnya koordinasi antar unit kerja, membaiknya kualitas sumberdaya aparatur, adanya inovasi teknologi informasi telah memungkinkan adanya percepatan terhadap realisasi pembangunan sesuai dengan pentahapan yang telah ditetapkan. Dan juga makin lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah telah mendorong adanya percepatan realisasi RPJMD setiap tahunnya.

Persentase Capaian RPJMD



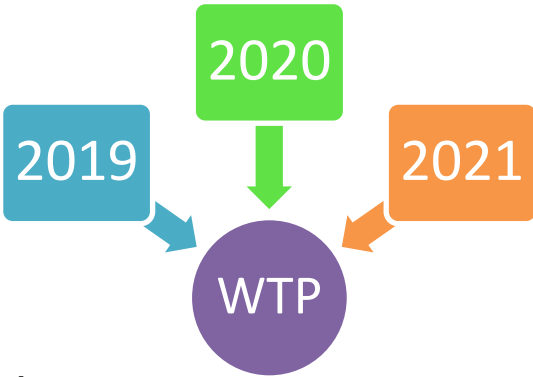
2. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Sementara itu, untuk indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan yang ditargetkan memperoleh opini WTP dapat direalisasi sesuai yang ditargetkan (100 persen).

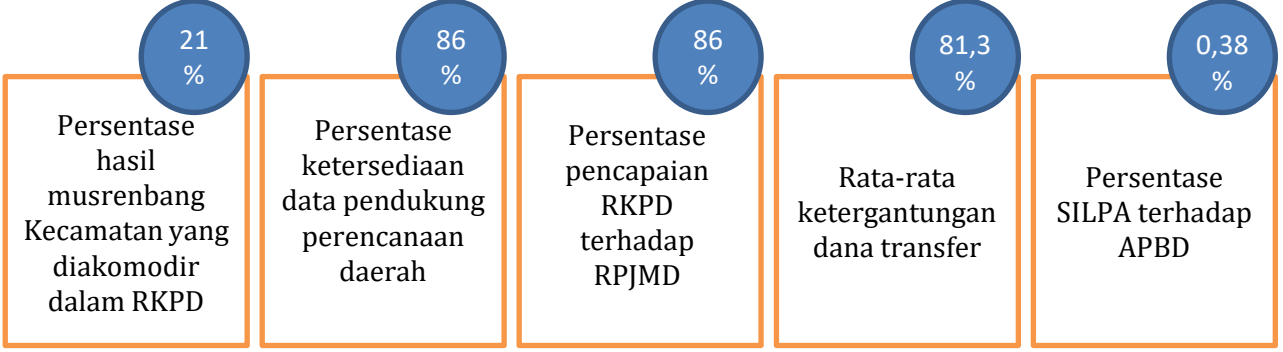
Selama 5 (lima) tahun terakhir, Kabupaten Dharmasraya dapat mempertahankan opini BPK terhadap Laporan Keuangan dengan prediket WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Hal tersebut didukung oleh komitmen yang sangat tinggi terhadap kepatuhan dalam melaksanakan seluruh peraturan yang menyangkut dengan akuntansi pemerintah. Pengelolaan keuangan di Kabupaten Dharmasraya telah dilaksanakan dengan memenuhi standar akuntansi pemerintah.

Ini dimungkinkan karena pemerintah daerah terus mendorong aparatur sipil negara untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan terkait dengan akuntansi keuangan. Pemerintah daerah mendorong adanya proses belajar bagi aparatur sipil negara untuk terus mengasah kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan agar pengelolaan keuangan benar benar memenuhi standar akuntansi negara.

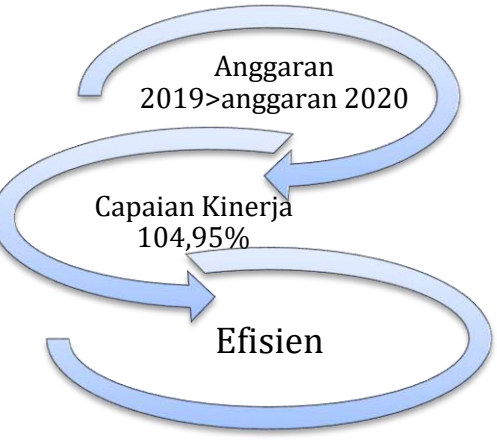


Faktor yang Pendukung Keberhasilan



Sumber: BAPPPEDA dan BKD Dharmasraya; 2021
*data sementara

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 15 Program dan 142 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86.691.548.174 ,-



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan dinilai efektif namun belum efisien. Jika dibandingkan di tahun 2020, untuk mencapai 1% kinerja dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 607.834.953 dengan 198 Kegiatan, sedangkan ditahun 2021, untuk mencapai 1% kinerja, membutuhkan anggaran Rp. 694.335.400 dengan 142 Kegiatan, maka dapat disimpulkan, anggaran untuk sasaran ini belum efisien, namun telah efektif, karena telah memangkas 56 kegiatan



13. Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan

Sasaran Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Hasil Evaluasi AKIP dan Nilai LPPD, dari kedua indikator tersebut, didapatkan nilai rata-rata tertimbang sebesar 101,49 dengan nilai Mean 92,5 dan termasuk kedalam kategori **Sangat Berhasil**

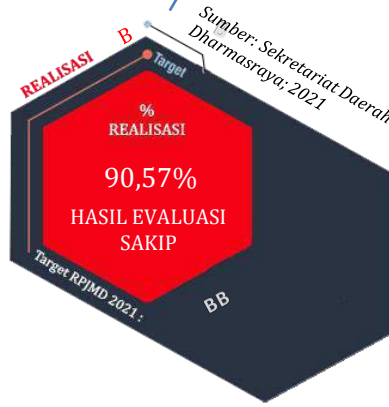
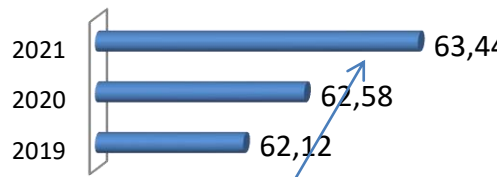
1. Hasil Evaluasi AKIP

Pada tahun 2021 hasil evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten Dharmasraya ditargetkan mendapat predikat BB atau minimal nilai 70. Target tersebut tercapai 90,57 persen karena, nilai SAKIP Kabupaten Dharmasraya hanya 63,44. Namun di tahun 2021, nilai hasil evaluasi AKIP hingga laporan ini diserahkan, nilai belum diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), sehingga Pemerintah Dharmasraya mengambil data capaian di tahun 2020 sebagai tolak ukur pencapaian di Tahun 2021.

Pencapaian AKIP Kabupaten Dharmasraya dalam 3 tahun terakhir belum mencapai target mendapatkan prediket BB, hal ini dikarenakan anggaran difokuskan untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 sehingga untuk mencapai sasaran ini alokasi anggaran di *refocusing*..

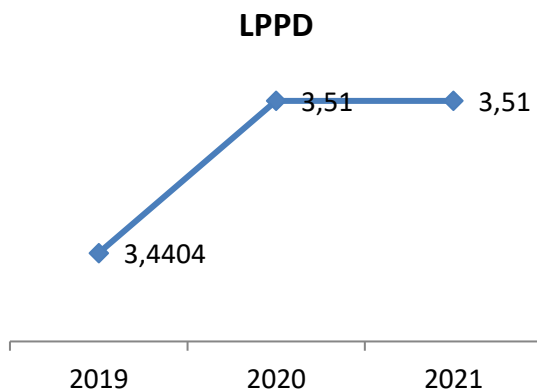
Keberhasilan mencapai target tersebut didukung oleh makin baiknya kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja. Selain itu ada keselarasan antar dokumen perencanaan baik daerah maupun OPD. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan juga ditingkatkan melalui evaluasi internal. Khusus hasil evaluasi AKIP ini, predikat yang diperoleh Kabupaten Dharmasraya masih dibawah perolehan provinsi yang mendapat nilai (BB). Ini berarti, meski capaian nilai AKIP sangat baik, namun ke depan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus terus melakukan perbaikan dalam penerapan SAKIP, supaya bisa mendapatkan nilai terbaik.

Nilai SAKIP Dharmasraya



2. Nilai LPPD

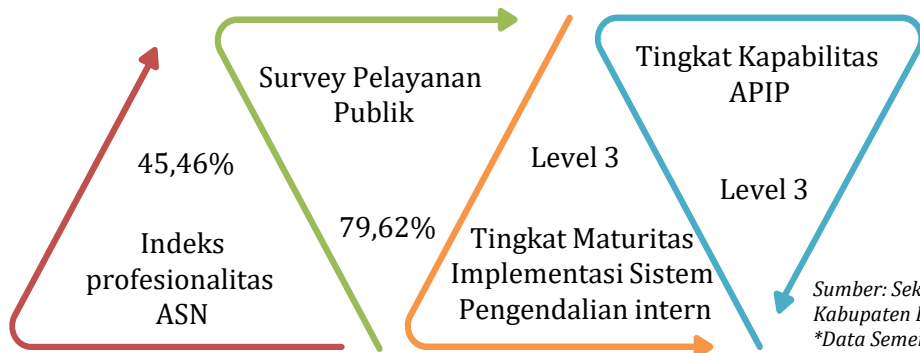
Pada tahun 2021 telah disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2020. Hasil laporan yang telah disusun tersebut disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan telah dievaluasi oleh Tim EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Provinsi dan Nasional. Hasil evaluasi LPPD di tahun 2021 ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari angka 3,4404 di tahun 2019 menjadi 3,5100 di tahun 2020, di tahun 2021, Nilai LPPD belum diterbitkan



Nilai ini meningkat menjadi 3,51 di tahun 2019 dengan status sangat tinggi (peringkat I di Provinsi Sumatera Barat). Kenaikan tersebut terjadi karena untuk penyusunan tahun 2019 disertai dengan data-data pendukung yang lengkap.

Nilai terhadap Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim EKPPD Daerah dan Nasional dan kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Peningkatan nilai LPPD ini, karena didukung oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya sumberdaya aparatur, dan makin lengkapnya fasilitas daerah serta adanya berbagai inovasi diantaranya mobil capil keliling, donor darah keliling dan berbagai



Faktor yang Pendukung Keberhasilan

Sumber: Sekretariat Daerah, BKPSDM dan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya; 2021
*Data Sementara

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas birokrasi pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 47 Program dan 258 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 126.960.423.403

Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas birokrasi pemerintah dinilai efektif namun belum efisien. Jika dibandingkan di tahun 2020, untuk mencapai 1% kinerja dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 605.758.048 dengan 454 Kegiatan, sedangkan di tahun 2021, untuk mencapai 1% kinerja, membutuhkan anggaran Rp. 673.500.572 dengan 258 Kegiatan, maka dapat disimpulkan, anggaran untuk sasaran ini belum efisien, namun telah efektif, karena telah memangkas 196 kegiatan



14. Meningkatkan status Pembangunan Nagari



Indikator Persentase Nagari Tertinggal dan Sangat Tertinggal

Keberhasilan pembangunan nagari ini dapat dilihat dari persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal. Pada tahun 2021 persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal ditarget 11,54 persen. Target tersebut bisa dicapai 3,85 persen atau hanya 2 nagari yang masih tertinggal dan sangat tertinggal. Capaian ini bahkan telah melebihi target sasaran akhir tahun RPJMD.

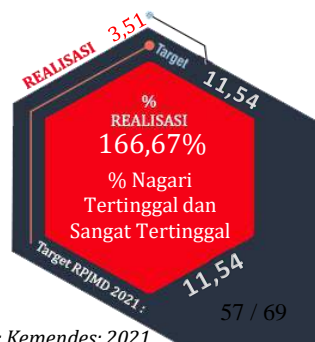
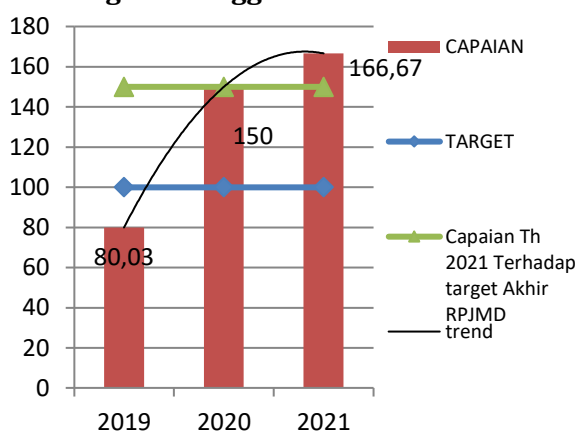
Capaian persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Dharmasraya jauh melebihi target yang ditetapkan, dan capaian tahun 2021 merupakan pencapaian tertinggi selama tiga tahun terakhir

Ditahun 2021, Dharmasraya telah mendapatkan prediket Kabupaten Maju menurut Perhitungan Indeks Desa membangun, hal ini tidak terlepas dari keseriusan Bupati dan juga pemangku kebijakan terkait untuk meningkatkan status Dharmasraya menjadi Kabupaten yang lebih baik lagi, beberapa factor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain, Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Lingkungan serta Indeks ketahanan Ekonomi di Kabupaten Dharmasraya telah mumpuni untuk menjadikan Dharmasraya sebagai Kabupaten yang Maju, saat ini, hanya 2 Desa yang menjadi perhatian daerah untuk ditingkatkan statusnya

Keberhasilan pencapaian sasaran Status Pembangunan Nagari di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 3 Program dan 11 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.577.962.330 .

Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja meningkatnya status pembangunan nagari dinilai efektif dan efisien. Jika dibandingkan di tahun 2020, untuk mencapai 1% kinerja dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 18.141.649 dengan 21 Kegiatan, sedangkan ditahun 2021, untuk mencapai 1% kinerja, membutuhkan anggaran Rp. 9.398.135 dengan 11 Kegiatan, jadi dapat disimpulkan untuk mencapai 1% kinerja sasaran ke-14, Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan anggaran sebesar Rp. 8.743.514

Persentase nagari Tertinggal dan sangat tertinggal Tahun 2019-2021



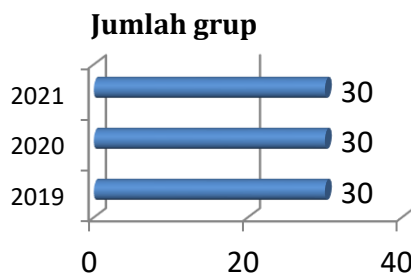
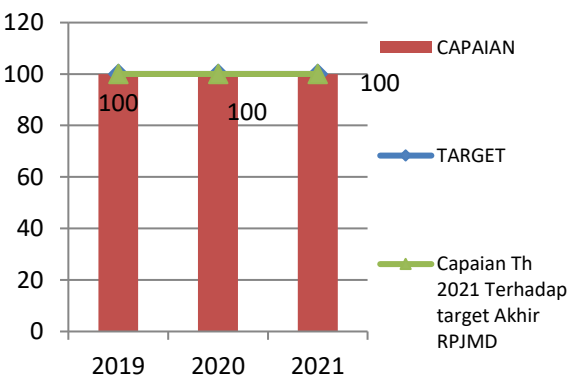
15. Sasaran Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah

Sasaran meningkatnya pelestarian budaya daerah diukur dengan 3 indikator antara Persentase lembaga adat yang aktif dengan capaian 100%, jumlah cagar budaya yang dilestarikan dengan capaian 100% dan jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan dengan capaian 100%. Rata-rata capaian sasaran meningkatnya pelestarian budaya daerah sebesar 300% dengan Kategori **Sangat Berhasil** dan **Mean 92,5**,

1. Jumlah Group Kesenian Daerah yang dilestarikan

Jumlah Kesenian Daerah yang dilestarikan ditargetkan sebesar 30 group. Jumlah tersebut dapat direalisasikan sebanyak 30 group dengan capaian 100 persen. Tercapainya target tersebut dipicu oleh keberhasilan berbagai program yang diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya. Salah satu program yang sukses adalah adanya event event yang memperlombakan penampilan aneka kesenian daerah.

Grup Kesenian Daerah yang dilestarikan



Sumber: Disbudparpora Dharmasraya; 2021

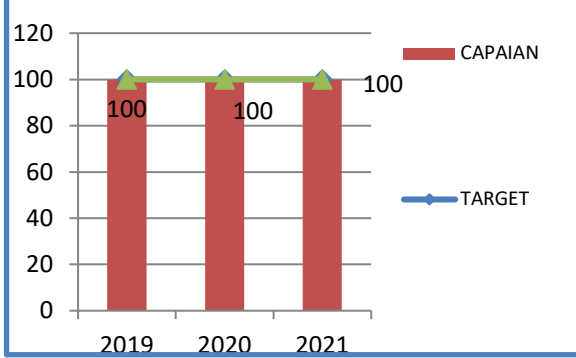
Capaian indicator jumlah grup kesenian daerah yang dilestarikan, telah mencapai 100%, capaian ini sama selama tiga tahun terakhir, dan grup kesenian daerah yang dilestarikan dari tahun 2019 hingga 2021 sama, sebanyak 30 grup

2. Persentase lembaga adat yang aktif

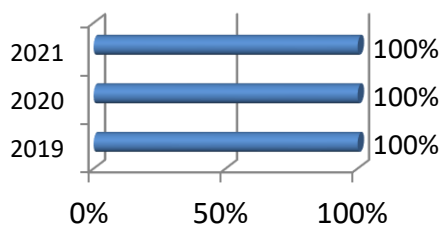
Target persentase lembaga adat yang aktif pada tahun 2021 adalah 100 persen. Tercapai sebesar 100 persen dan capaiannya juga 100 persen. Ini berarti lembaga adat di Kabupaten Dharmasraya dalam kondisi aktif.

Faktor yang mendorong aktif dan tidaknya lembaga adat adalah pengelolaan, pendanaan dan juga dukungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengalokasikan anggaran untuk insentif para pemangku adat. Selain itu, juga memberikan peran dan ruang bagi lembaga adat untuk ikut menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan.

% Lembaga adat aktif



% Lembaga adat aktif



Sumber: Disbudparpora Dharmasraya; 2021

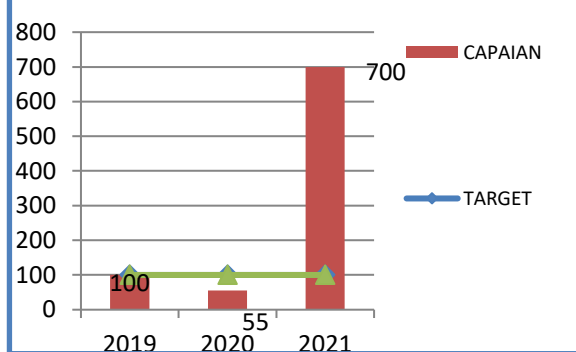
Capaian indikator persentase Lembaga adat yang aktif, telah mencapai 100%, capaian ini sama selama tiga tahun terakhir, ini artinya seluruh lembaga adat yang ada di Kabupaten Dharmasraya telah aktif dan telah diberikan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

3. Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan

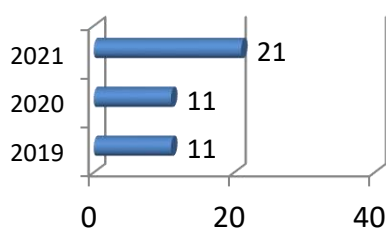
Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menargetkan cagar budaya yang ditetapkan sebanyak 3 unit, dan tercapai 21 unit dengan capaian 700%. Seluruh unit cagar budaya yang ditetapkan telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Dharmasraya untuk menjadi cagar budaya yang dilestarikan pemerintah daerah. Pencapaian tersebut dapat terlaksana atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Bidang Kebudayaan, bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat di Batusangkar dan Balai Arkeologi Sumatera Utara di Medan.

Kedepan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus membangun kerjasama dengan lembaga - lembaga kepurbakalaan agar dapat membantu menetapkan cagar budaya dan melestarikannya untuk keperluan wisata, penelitian dan juga pembelajaran (*education*).

Cagar Budaya ditetapkan



Cagar Budaya ditetapkan



Sumber: Disbudparpora Dharmasraya; 2021

Keberhasilan pencapaian sasaran Pelestarian Budaya Daerah di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan 9 Program dan 12 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.487.032.230,-

2020 (1% Kinerja)
Rp. 22.950.879

2021 (1% Kinerja)
Rp. 11.450.485

Efisien

Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya pelestarian budaya daerah dinilai efektif dan efisien. Jika dibandingkan di tahun 2020, untuk mencapai 1% kinerja dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 22.950.879 dengan 21 Kegiatan, sedangkan ditahun 2021, untuk mencapai 1% kinerja, membutuhkan anggaran Rp. 11.450.485 dengan 12 Kegiatan, jadi dapat disimpulkan untuk mencapai 1% kinerja sasaran ke-15, Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan anggaran sebesar Rp. 11.500.394



B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3. 9 REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021

NO	PROGRAM	KEG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
Anggaran Tidak Langsung Mempengaruhi Sasaran Strategis				
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		14.685.308.770	14.207.971.845
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Gaji dan Tunjangan)		378.236.150.348	364.300.337.695
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1	105.199.300	104.703.650
2	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1	64.804.600	64.770.600
3	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	64.763.400	63.725.250
4	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	33.150.000	32.632.500
5	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	68.936.800	68.495.500
6	Peningkatan Pelayanan BLUD	1	40.000.000.000	-
7	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	2.476.047.000	2.450.280.900
8	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2	1.155.942.000	1.140.927.700
9	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	75.353.250	75.235.400
10	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	3	141.823.150	131.752.300
11	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	100.000.000	100.000.000
12	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1	172.500.000	171.990.000
13	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1	748.505.500	742.924.600
14	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2	201.461.100	189.046.700

NO	PROGRAM	KEG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
15	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	315.123.000	309.301.600
16	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	28.837.500	28.623.500
17	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1	75.000.000	75.000.000
18	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12	43.189.982.820	39.751.376.229
19	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21	22.648.388.204	17.121.178.362
20	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2	2.735.160.800	1.144.380.257
TOTAL PER SASARAN		56	114.400.978.424	63.766.345.048
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat				
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	12	29.625.919.850,00	28.442.563.327
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12	10.792.967.000,00	10.428.118.668
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5	5.962.089.950,00	5.939.505.342
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	938.215.450,00	878.641.250
5	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1	19.527.000,00	14.330.000
6	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	107.996.000,00	106.005.200
7	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3	524.243.250	507.149.850
8	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	13.796.000	13.762.450
9	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	2	33.605.000	33.172.000
10	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	1	12.205.000	12.101.750
TOTAL PER SASARAN		39	48.030.564.500	46.375.349.837
Meningkatnya ketahanan pangan				
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2	29.379.650	29.249.350
2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2	527.778.850	527.309.050
3	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	17.384.000	17.189.000
4	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1	15.443.250	15.439.100
5	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2	1.466.876.800	1.462.760.200
6	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	1	22.385.000	22.374.700
7	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	14.069.000	14.016.900
TOTAL PER SASARAN		10	2.093.316.550	2.088.338.300
Meningkatnya kesetaraan gender				
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	48.172.000	46.805.400

NO	PROGRAM	KEG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	660.043.200	641.306.021
3	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1	75.286.550	74.736.400
4	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	67.072.400	66.274.450
5	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1	27.552.000	26.185.800
6	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1	112.342.500	108.317.400
7	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1	18.953.350	16.714.500
8	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	14.875.000	13.524.100
9	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1	16.869.900	16.420.900
10	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	1	34.376.200	33.531.350
TOTAL PER SASARAN		10	1.075.543.100	1.043.816.321
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan				
1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2	9.808.921.455	9.507.841.696
2	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1	44.091.033.700	38.648.073.681
3	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	4	23.117.540.570	22.225.556.349
4	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1	126.812.500	103.666.300
5	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	23.132.400	19.186.450
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1	150.751.650	117.909.111
7	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3	112.352.273	107.565.050
8	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	133.319.000	132.715.800
9	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	20.095.000	18.183.900
10	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1	102.191.600	99.970.900
TOTAL PER SASARAN		16	77.686.150.148	70.980.669.237
Meningkatnya kualitas perumahan				
1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	63.437.250	40.725.150
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 1 (sepuluh) Ha	1	1.459.201.450	1.447.586.417
3	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1	61.563.800	58.405.206
4	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2	867.219.966	813.141.151
5	Penerbitan Izin Membuka Tanah	1	482.988.500	224.844.910
6	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1	9.335.500	9.320.300
TOTAL PER SASARAN		7	2.943.746.466	2.594.023.134
Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak				

NO	PROGRAM	KEG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	467.935.671	388.839.959
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	3.231.857.800	2.436.961.100
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2	8.437.293.400	8.155.269.379
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	4.851.871.449	4.691.273.558
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1.166.685.130	1.155.271.450
TOTAL PER SASARAN		9	18.155.643.450	16.827.615.446
Meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB				
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2	35.515.000	34.915.700
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2	217.835.000	214.827.700
3	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1	408.799.750	405.641.550
4	Pembangunan Prasarana Pertanian	6	5.666.711.549	5.594.801.362
5	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	1	175.532.950	175.280.850
6	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2	556.494.618	555.907.000
TOTAL PER SASARAN		14	7.060.888.867	6.981.374.162
Meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat				
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	45.252.300	24.705.900
2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	197.379.000	186.376.650
3	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2	223.895.000	189.155.600
4	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1	13.730.850	13.508.400
5	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1	22.368.360	22.110.600
6	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	2	78.241.515	76.967.197
7	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	397.842.400	370.399.200
8	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	24.600.500	24.510.550
9	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1	37.657.700	37.580.400
TOTAL PER SASARAN		11	1.040.967.625	945.314.497

NO	PROGRAM	KEG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
Menurunnya Tingkat Kemiskinan				
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3	90.832.200	90.621.800
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4	63.365.550	63.239.750
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	93.417.800	93.379.300
4	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	540.967.000	540.680.550
5	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	150.322.000	135.947.250
6	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	94.073.800	93.085.200
7	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	650.391.750	635.884.329
8	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3	326.122.020	320.355.448
9	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	246.886.600	225.722.050
10	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	189.796.250	189.556.343
11	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1	30.233.750	29.989.900
TOTAL PER SASARAN		18	2.476.408.720	2.418.461.920
Meningkatnya pemanfaatan, pengelolaan, serta pengendalian fungsi-fungsi lingkungan hidup				
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	2	325.645.950	325.170.131
2	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2	175.941.300	172.480.508
3	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1	562.046.400	558.251.000
4	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1	20.003.600	19.957.250
5	Penyimpanan Sementara Limbah B3	1	7.247.200	6.837.900
6	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	33.534.250	33.423.500
7	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	1	15.792.400	15.730.250
8	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	16.500.000	16.325.200
9	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	1	10.698.000	10.455.850
10	Pengelolaan Sampah	1	506.675.500	497.102.662
11	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	20.068.650	18.181.250
12	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	24.752.335.051	434.324.730
13	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	1.014.585.000	998.287.550
14	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	79.418.300	72.649.850

NO	PROGRAM	KEG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
TOTAL PER SASARAN		17	27.540.491.601	3.179.177.631
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan				
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4	1.691.223.150	1.638.778.736
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2	148.438.000	145.124.925
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102	7.567.201.168	6.907.200.617
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	6	398.727.100	389.460.236
5	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	113.725.513.885	55.919.104.813
6	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1	293.273.000	291.581.411
7	Pengelolaan Barang Milik Daerah	7	896.591.350	887.604.687
8	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4	642.231.500	626.564.297
9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2	968.022.900	947.886.314
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2	22.992.000	19.995.400
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	15.821.000	13.606.700
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2	128.970.950	125.879.624
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3	98.967.950	91.291.050
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3	239.341.900	234.936.633
15	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1	123.107.550	114.557.592
TOTAL PER SASARAN		142	86.691.548.174	82.952.250.284
Meningkatnya kualitas Birokrasi Pemerintahan				
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	79.327.500	79.029.350
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	441.195.000	440.827.500
3	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	50.907.000	49.727.500
4	Pelayanan Pencatatan Sipil	1	17.510.000	17.510.000
5	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3	104.222.000	104.002.800
6	Penyusunan Profil Kependudukan	1	23.473.000	23.399.200
7	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3	400.103.750	397.692.657
8	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	678.251.300	677.332.400
9	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	3	118.339.500	117.873.300
10	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	52.234.250	50.608.350
11	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1	135.070.300	134.411.800
12	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	200.000.000	196.238.362
13	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	1.185.433.041	1.137.878.245

NO	PROGRAM	KEG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
14	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3	525.513.200	494.950.000
15	Penataan Organisasi	3	219.357.952	212.493.650
16	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3	4.829.202.100	4.673.397.745
17	Administrasi Tata Pemerintahan	3	269.657.000	249.439.780
18	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3	4.158.542.640	3.891.700.423
19	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3	349.945.500	344.365.600
20	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1	50.966.760	44.201.100
21	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	3	346.767.025	342.739.003
22	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	3	205.050.500	201.843.306
23	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	870.314.680	864.803.314
24	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1	96.490.000	88.691.050
25	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5	603.115.750	585.659.370
26	Mutasi dan Promosi ASN	1	40.569.500	40.345.650
27	Pengembangan Kompetensi ASN	4	360.408.950	351.009.159
28	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3	46.211.000	44.862.430
29	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1	1.009.748.000	1.009.055.750
30	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1	4.505.591.500	4.385.809.730
31	Layanan Administrasi DPRD	1	263.500.000	173.014.000
32	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1	222.050.000	200.144.000
33	Peningkatan Kapasitas DPRD	2	2.052.283.000	1.803.209.530
34	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2	11.515.464.200	11.279.297.491
35	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1	853.590.000	779.579.299
36	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7	491.444.450	461.999.358
37	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1	30.775.500	28.144.000
38	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1	20.559.500	20.203.600
39	Pendampingan dan Asistensi	3	253.183.100	248.322.626
40	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18	4.259.521.200	4.138.040.350
41	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108	43.465.910.876	41.344.457.893
42	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	539.295.600	497.448.423
43	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6	671.336.050	648.210.190
44	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11	57.450.000	57.210.000
45	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	2.540.000	2.400.000
46	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6	10.730.000	10.670.000
47	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10	8.396.000	8.001.000
TOTAL PER SASARAN		258	126.960.423.403	68.353.573.035
Meningkatkan status pembangunan nagari				
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	2	55.758.850	55.429.475
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5	737.055.030	726.697.194

NO	PROGRAM	KEG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	785.148.450	784.260.500
TOTAL PER SASARAN		11	1.577.962.330	1.566.387.169
Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah				
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	1.658.483.000	1.653.603.650
2	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	254.977.850	254.814.919
3	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	410.061.150	409.509.750
4	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1	70.942.600	69.033.900
5	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	16.898.300	15.584.700
6	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	1	837.778.230	797.207.120
7	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	30.000.000	30.000.000
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2	56.419.250	55.420.400
9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2	151.471.850	149.970.920
TOTAL PER SASARAN		12	3.487.032.230	3.435.145.359
TOTAL ANGGARAN YANG Mendukung SASARAN STRATEGIS		630	521.221.665.588	373.507.841.379
TOTAL SELURUH ANGGARAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021			914.143.124.706	752.016.150.919

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Output dari implementasi SAKIP dapat digambarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat terhadap kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam bab- bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 memberikan informasi kepada stakeholders atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 15 (Lima belas) sasaran strategis yang diukur oleh 25 (dua puluh lima) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021
2. Kategori keberhasilan 25 indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 23 indikator kinerja utama dengan kategori sangat berhasil dengan capaian > 85%
 - b. Sebanyak 2 indikator kinerja utama dengan kategori berhasil dengan capaian 70- 85%

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum atau tidak memenuhi target, kami menyadari semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang.

Menindaklanjuti isu-isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2021, maka langkah –langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah antara lain:

1. Menjadikan capaian kinerja tahun 2021 sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan perencanaan kinerja pada tahun yang akan datang dengan mengalokasikan anggaran memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan memiliki daya ungkit menunjang pencapaian target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah.
2. Menyelaraskan antara indikator kinerja pendukung yang ada di Organisasi Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Pemerintah Daerah untuk memudahkan dalam pengukuran pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dengan pengawasan dan monitoring memperkuat kematangan system pengendalian internal pemerintah.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target, kami menyadari semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KABUPATEN DHARMASRAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN
Jabatan : BUPATI DHARMASRAYA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pulau Punjung, 2021
BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	71,46
2	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,65
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,24
3	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,23
4	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,15
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	50,73
5	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	63,33
6	Meningkatnya kualitas perumahan	Rasio rumah layak huni	Persen	89,00
7	Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak	Akses air minum layak	Persen	30,08
		Akses Sanitasi Layak	Persen	42,91
8	Meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	29,0
9	Meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat	Jumlah Koperasi Sehat	Unit	30,0
		Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	Unit	40,0
		Persentase IKM dengan peningkatan Omset	%	6,5
		Persentase Pasar dalam kondisi baik	%	30,00
10	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Persen	5,62
11	Meningkatnya pemanfaatan, pengelolaan, serta pengendalian fungsi-fungsi lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,50

12	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan	Persentase Capaian RPJMD (IKU Daerah)	Persen	95,00
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WD P/TW/disclaimer	WTP
13	Meningkatnya kualitas Birokrasi Pemerintahan	Hasil evaluasi AKIP	Predikat/nilai	BB
		Nilai LPPD	Predikat/nilai	3,1226
14	Meningkatkan status pembangunan nagari	Persentase Nagari tertinggal dan sangat tertinggal	Persen	11,54
15	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	Jumlah grup kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	30,00
		Persentase Lembaga Adat Yang Aktif	Persen	100,00
		Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Unit	3,00

No	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp 105.199.300
2	Program Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 64.804.600
3	Program Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 64.763.400
4	Program Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 33.150.000
5	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 68.936.800
6	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 40.000.000.000
7	Program Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp 2.476.047.000
8	Program Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.155.942.000
9	Program Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 75.353.250
10	Program Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp 141.823.150
11	Program Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000

12	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp	172.500.000
13	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp	748.505.500
14	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp	75.000.000
15	Program Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	43.189.982.820
16	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	22.648.388.204
17	Program Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp	2.735.160.800
18	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp	29.625.919.850
19	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp	10.792.967.000
20	Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp	5.962.089.950
21	Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp	938.215.450
22	Program Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp	19.527.000
23	Program Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp	107.996.000
24	Program Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	524.243.250
25	Program Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	13.796.000
26	Program Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Rp	33.605.000
27	Program Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Rp	12.205.000
28	Program Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp	201.461.100
29	Program Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp	315.123.000
30	Program Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp	28.837.500
31	Program Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp	29.379.650
32	Program Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp	527.778.850
33	Program Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	17.384.000

34	Program Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp	15.443.250
35	Program Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp	1.466.876.800
36	Program Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Rp	22.385.000
37	Program Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	14.069.000
38	Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	48.172.000
39	Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	660.043.200
40	Program Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp	75.286.550
41	Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	67.072.400
42	Program Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp	27.552.000
43	Program Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp	112.342.500
44	Program Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp	18.953.350
45	Program Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	14.875.000
46	Program Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	16.869.900
47	Program Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Rp	34.376.200
48	Program Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp	9.808.921.455
49	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp	44.091.033.700
50	Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	23.117.540.570
51	Program Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp	126.812.500
52	Program Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp	23.132.400
53	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp	150.751.650
54	Program Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp	112.352.273
55	Program Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp	133.319.000
56	Program Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	20.095.000

57	Program Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp	102.191.600
58	Program Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rp	63.437.250
59	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 1 (sepuluh) Ha	Rp	1.459.201.450
60	Program Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rp	61.563.800
61	Program Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp	867.219.966
62	Program Penerbitan Izin Membuka Tanah	Rp	482.988.500
63	Program Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp	9.335.500
64	Program Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	467.935.671
65	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.231.857.800
66	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8.437.293.400
67	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.851.871.449
68	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.166.685.130
69	Program Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp	35.515.000
70	Program Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	217.835.000
71	Program Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp	408.799.750
72	Program Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp	5.666.711.549
73	Program Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Rp	175.532.950
74	Program Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp	556.494.618
75	Program Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	45.252.300
76	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	197.379.000
77	Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp	223.895.000
78	Program Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp	13.730.850
79	Program Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp	22.368.360

80	Program Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp	78.241.515
81	Program Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp	397.842.400
82	Program Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	24.600.500
83	Program Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	37.657.700
84	Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp	90.832.200
85	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp	63.365.550
86	Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	93.417.800
87	Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp	540.967.000
88	Program Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	150.322.000
89	Program Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp	94.073.800
90	Program Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	650.391.750
91	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	326.122.020
92	Program Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp	246.886.600
93	Program Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp	189.796.250
94	Program Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp	30.233.750
95	Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp	325.645.950
96	Program Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	175.941.300
97	Program Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	562.046.400
98	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp	20.003.600
99	Program Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp	7.247.200
100	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	33.534.250
101	Program Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp	15.792.400
102	Program Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	16.500.000

103	Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp	10.698.000
104	Program Pengelolaan Sampah	Rp	506.675.500
105	Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp	20.068.650
106	Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp	24.752.335.051
107	Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp	1.014.585.000
108	Program Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp	79.418.300
109	Program Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	79.327.500
110	Program Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp	441.195.000
111	Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	50.907.000
112	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp	17.510.000
113	Program Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	104.222.000
114	Program Penyusunan Profil Kependudukan	Rp	23.473.000
115	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	400.103.750
116	Program Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	678.251.300
117	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp	118.339.500
118	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	52.234.250
119	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	135.070.300
120	Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	200.000.000
121	Program Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	1.185.433.041
122	Program Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp	525.513.200
123	Program Penataan Organisasi	Rp	219.357.952
124	Program Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp	4.829.202.100
125	Program Administrasi Tata Pemerintahan	Rp	269.657.000

126	Program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp	4.158.542.640
127	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp	349.945.500
128	Program Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp	50.966.760
129	Program Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp	346.767.025
130	Program Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp	205.050.500
131	Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	870.314.680
132	Program Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp	96.490.000
133	Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp	603.115.750
134	Program Mutasi dan Promosi ASN	Rp	40.569.500
135	Program Pengembangan Kompetensi ASN	Rp	360.408.950
136	Program Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp	46.211.000
137	Program Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp	1.009.748.000
138	Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp	4.505.591.500
139	Program Layanan Administrasi DPRD	Rp	263.500.000
140	Program Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp	222.050.000
141	Program Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp	2.052.283.000
142	Program Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp	11.515.464.200
143	Program Pembahasan Kerja Sama Daerah	Rp	853.590.000
144	Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp	491.444.450
145	Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp	30.775.500
146	Program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp	20.559.500
147	Program Pendampingan dan Asistensi	Rp	253.183.100
148	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	4.259.521.200
149	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	43.465.910.876

150	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	7.567.201.168
151	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	539.295.600
152	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	671.336.050
153	Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp	57.450.000
154	Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp	2.540.000
155	Program Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	10.730.000
156	Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp	8.396.000
157	Program Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp	1.691.223.150
158	Program Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp	148.438.000
159	Program Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp	398.727.100
160	Program Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	113.725.513.885
161	Program Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rp	293.273.000
162	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	896.591.350
163	Program Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rp	642.231.500
164	Program Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp	968.022.900
165	Program Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	22.992.000
166	Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	15.821.000
167	Program Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp	128.970.950
168	Program Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp	98.967.950
169	Program Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp	239.341.900
170	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp	123.107.550
171	Program Fasilitas Kerja sama antar Desa	Rp	55.758.850
172	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	737.055.030
173	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	Rp	785.148.450

	Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
174	Program Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.658.483.000
175	Program Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 254.977.850
176	Program Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 410.061.150
177	Program Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp 70.942.600
178	Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 16.898.300
179	Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Rp 837.778.230
180	Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 30.000.000
181	Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 56.419.250
182	Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp 151.471.850
TOTAL		Rp 521.221.665.588

Pulau Punjung,

2021



BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE